



PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU



LKJIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH

DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

20
24

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Penyajian LKjIP Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sangat disadari bahwa laporan kinerja ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sepanjang tahun 2024. Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan, penataan serta peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 27 Februari 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau



Dr. MOH. Bisri, SKM, M.Kes
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 197101091995011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB 1.....	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
BAB 2.....	5
RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA.....	5
2.1. Rencana Strategis	5
2.2. Perjanjian Kinerja	6
BAB 3.....	8
AKUNTABILITAS KINERJA.....	8
3.1. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024.....	8
3.1.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU).....	9
3.1.2 Capaian Kinerja Indikator Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	20
3.2. Akuntabilitas Kinerja RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau.....	60
3.3. Akuntabilitas Kinerja RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau	66
3.4 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024	61
BAB 4.....	67
PENUTUP.....	69

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 merupakan sebuah media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Kesehatan sebagai pelayanan publik. Kegiatan yang diprioritaskan dijabarkan dalam bentuk 4 Sasaran Strategis, 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 17 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Pengukuran indikator kinerja berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2024, 14 Indikator Kinerja Sasaran tercapai dengan “sangat baik” dan 3 indikator dengan kategori capaian “Baik”. Secara garis besar, pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam kategori sangat baik, perlu dipertahankan dan tetap meningkatkan performa kinerja agar target kinerja setiap tahun bisa tercapai.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur guna senantiasa membangun akuntabilitas sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kesehatan yang berlangsung dengan bijaksana, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang bersih dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme.

Pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi dan dalam PermenPAN Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini akan memberikan gambaran pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam satu tahun anggaran beserta dengan hasil capaian indikator kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau didasarkan pada permenpan Nomor 53 tahun 2014 sebagai pelaporan kinerja dan bentuk pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai sasaran Program yang wajib dipenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021-2026.

Tujuan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Kepri untuk meningkatkan kinerjanya.

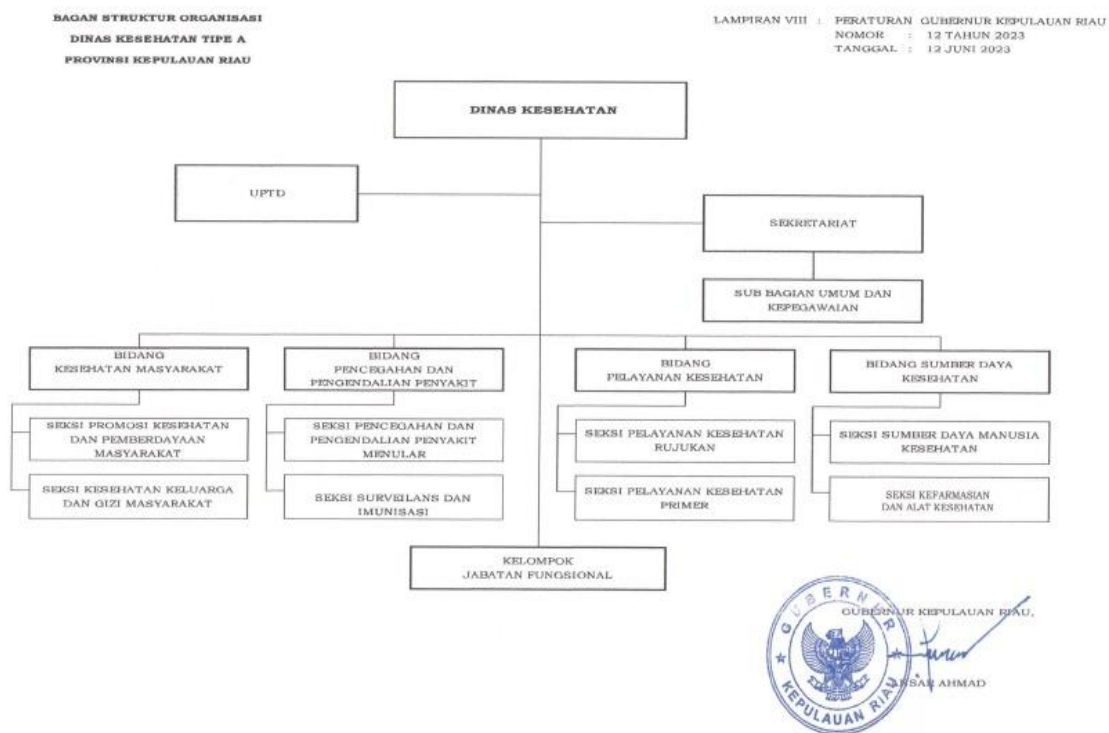
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah, Dinas Kesehatan provinsi kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan yang di tugaskan kepada Daerah Provinsi dalam hal ini merumuskan kebijakan dibidang sekretariat, bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan, kelompok jabatan fungsional. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
4. Pelaksanaan proses penerbitan rekomendasi perizinan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
5. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kesehatan yang diberikan oleh Gubernur.

Berdasarkan jenis dan tipologi perangkat daerah, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau merupakan Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Pada Gambar 1.1., Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Sekretariat memiliki 1 Subbag, sedangkan tiap bidang memiliki 2-3 seksi. Jumlah jabatan eselon II terdiri atas 1 orang, eselon III sebanyak 5 orang dan eselon IV sebanyak 9 orang. Terdapat dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yaitu RSUD Raja Ahmad Tabib dan RSUD Engku Haji Daud. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui gambar berikut ini :



Gambar 1.1.
Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

BAB 2 RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kepulauan Riau merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kepulauan Riau telah menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kepulauan Riau yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 – 2026.

MISI ke- 3 (Ketiga) : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun mendatang, secara rinci dapat dilihat melalui Tabel 2.1. berikut ini :

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI (Gubernur Kepulauan Riau) : "Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya"			
MISI (Gubernur Kepulauan Riau) ke - 3 : Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing Dengan Berbasis Iman dan Taqwa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	Meningkatnya kesehatan keluarga dan lingkungan sehat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi • Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda • Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kesehatan Masyarakat • Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (<i>Continuum Of Care</i>) • Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan faktor risiko penyakit menular dan tidak menular 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Pengendalian Penyakit
	Meningkatnya pemenuhan Sumber Daya Kesehatan sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pelaksanaan JKN Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan cakupan kepemilikan Meningkatkan Akses, Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (<i>Primary Health Care</i>) Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tata Kelola Pemerintah yang bersih, dan antisipatif	Peningkatan kapasitas dan kualitas tata Kelola pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penguatan tata kelola melalui pelaksanaan reformasi birokrasi efektif 	<ul style="list-style-type: none"> Sinkronisasi pelayanan pemerintahan berkinerja

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan

antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah yang menerima amanah/tanggung jawab (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau) dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja (Gubernur Kepulauan Riau). Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/instansi yang bersangkutan. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 selengkapnya terdapat pada Lampiran 1.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan dan Indikator yang ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu: (a) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya, (b) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepri.

3.1. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

1. Indikator dengan *progress* positif adalah indikator dengan realisasi semakin tinggi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik. Digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Indikator dengan *progress* negatif adalah indikator dengan realisasi semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik. Digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja Indikator} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
$X > 100\%$	Sangat Baik
$75 < X < 99$	Baik
$55 < X < 74$	Cukup
$X < 55$	Kurang

3.1.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi. Penetapan indikator kinerja utama dilingkungan pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi, meliputi indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam *balanced scorecard* merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam merubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. Capaian kinerja indikator utama Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan melalui tabel dibawah ini, dengan membandingkan antara target dengan capaian kinerja tahun 2024, 2023 dan 2022.

Tabel 3.1.
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 5 (Lima) Tahun (2021-2026)	Tahun 2024				Tahun 2023	Tahun 2022
			Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	Capaian
1	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	12.8	14	16,8*	80	Baik	16,8	15,4

* Data Sementara Realisasi Prevalensi Stunting Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.1. capaian kinerja tahun 2024 belum tersedia dikarenakan menunggu data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 yang sedang dalam proses pendataan, maka dari itu persentase stunting Provinsi Kepulauan Riau masih menggunakan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 dimana prevalensi stunting mencapai angka 16,8%, dengan capaian kinerja sebesar 80% atau dalam kategori baik. Sementara itu, capaian indikator prevalensi stunting belum mencapai target provinsi karena prevalensi stunting provinsi 16,8% sedangkan target prevalensi stunting secara provinsi sebesar 14%.

Sedangkan jika dilihat dari capaian pada indikator prevalensi stunting pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target nasional maka sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan, sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.
Capaian Prevalensi Stunting Berdasarkan Target Nasional
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prevalensi Stunting	16	16,8*	95,2

* Data Sementara Realisasi Prevalensi Stunting Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, prevalensi stunting mencapai angka 16,8%, dengan capaian kinerja sebesar 95,2% atau dalam kategori baik. Sementara itu, capaian indikator

prevalensi stunting belum mencapai target nasional karena prevalensi stunting provinsi 16,8% sedangkan target prevalensi stunting secara nasional sebesar 16%;

Setiap tahun terjadi penurunan kasus stunting yang cukup signifikan, terlihat dengan perbandingan prevalensi stunting Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2020 – 2024. Kendala yang di hadapi dalam penanganan stunting adalah tenaga gizi terbatas, penimbangan Balita masih rendah sehingga belum bisa menjangkau total coverage seluruh sasaran balita, alat antropometri di Posyandu belum semua terstandar, masih terdapat Pengukuran BB dan TB yang dilakukan oleh kader yang belum terorientasi pemantauan pertumbuhan. Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah melakukan validasi data setiap bulan melibatkan lintas program dan lintas sektor, penggerakan masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat sehingga lebih banyak balita yang datang ke Posyandu, Revitalisasi posyandu melalui orientasi kader dan peningkatan sarana prasarana posyandu seperti pengadaan antropometri kit.

Perbandingan target dan realisasi prevalensi balita stunting di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.
Capaian Kinerja Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 – 2024

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi
1.	Prevalensi stunting	2020	20,35	16,82
		2021	20	16,3
		2022	15,8	15,4
		2023	15,3	16,8
		2024	14	16,8*

* Data Sementara Realisasi Prevalensi Stunting Tahun 2024

Berikut jumlah prevalensi stunting di 7 kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Prevalensi Stunting se- Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

NO	Kabupaten Kota	2021	2022	2023	2024
1.	KARIMUN	17,6	13,3	17,9	17,9*
2.	BINTAN	20	17,8	21,6	21,6*
3.	NATUNA	17,8	18	16,1	16,1*
4.	LINGGA	25,4	18,9	20,5	20,5*
5.	KEPULAUAN ANAMBAS	21,7	14	15,2	15,2*
6.	BATAM	17,5	15,2	16,1	16,1*
7.	TANJUNGPINANG	18,8	15,7	15,2	15,2*
	PROVINSI	17,6	15,4	16,8	16,8*

* Data Sementara Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas prevalensi stunting tahun 2024 belum tersedia dikarenakan menunggu data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 yang sedang dalam proses pendataan, maka dari itu persentase stunting Provinsi Kepulauan Riau masih menggunakan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023. Pada tahun 2024, prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau meningkat dari tahun sebelumnya. Prevalensi stunting tertinggi di Kabupaten Bintan dengan capaian 21,6 % dan terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas serta Kota Tanjungpinang 15,2 %. Apabila dilihat angka Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan semua Kabupaten/Kota mengalami kenaikan, kecuali Kabupaten Natuna yang mengalami penurunan prevalensi sebesar 1,9 % dan Kota Tanjungpinang mengalami penurunan sebanyak 0,5 %. Kenaikan prevalensi tertinggi adalah Kabupaten Karimun sebesar 4,6% disusul dengan Kabupaten Bintan yang mengalami kenaikan 3,8% dan Kabupaten Lingga dengan kenaikan 1,6% dari tahun sebelumnya.

Berikut disampaikan prevalensi stunting di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2021–2024 :

Tabel 3.5.
Prevalensi stunting di Indonesia Tahun 2021-2024

NO	Kabupaten Kota	2021	2022	2023	2024
1.	BALI	10,9	8	7,2	7,2
2.	JAMBI	22,4	18	13,5	13,5
3.	RIAU	22,3	17	13,6	13,6
4.	LAMPUNG	18,5	15,2	14,9	14,9
5.	KEPULAUAN RIAU	17,6	15,4	16,8	16,8*
6.	KALIMANTAN UTARA	27,5	22,1	17,4	17,4
7.	Dst				
	INDONESIA	24,4	21,6	21,5	21,5

Berdasarkan tabel 3.5. diatas prevalensi stunting di Indonesia tahun 2024 belum tersedia dikarenakan menunggu data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 yang sedang dalam proses pendataan, maka dari itu persentase stunting Provinsi Kepulauan Riau masih menggunakan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023.

Secara nasional prevalensi stunting di Indonesia menetap dari tahun 2022 sebesar 21,6% menjadi 21,5% pada tahun 2024. Berdasarkan data SKI 2023, menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi terendah nomor 5 se-Indonesia setelah Bali, Jambi, Riau, Lampung. Untuk pengukuran kinerja, maka capaian prevalensi stunting Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam kategori sangat baik karena sudah melampaui target dengan capaian kinerja sebesar 109,8%.

Determinan stunting adalah faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya stunting pada balita, dan saling terkait serta dapat memperkuat satu sama lain. Determinan ini terjadi pada 3 periode yaitu periode prenatal, kelahiran dan postnatal.

Periode waktu yang berperan terhadap stunting adalah pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Edukasi bagi ibu dan keluarga menjadi penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan anak pada 1000 HPK agar dapat mencegah stunting. Pola asuh orangtua, status ekonomi, BBLR, dan asupan gizi juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan untuk pencegahan stunting.

Berdasarkan analisis dari beberapa indikator penyebab stunting dilihat dari intervensi spesifik, peningkatan prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau di akibatkan oleh beberapa faktor yang belum mencapai target pada tahun 2024 diantaranya :

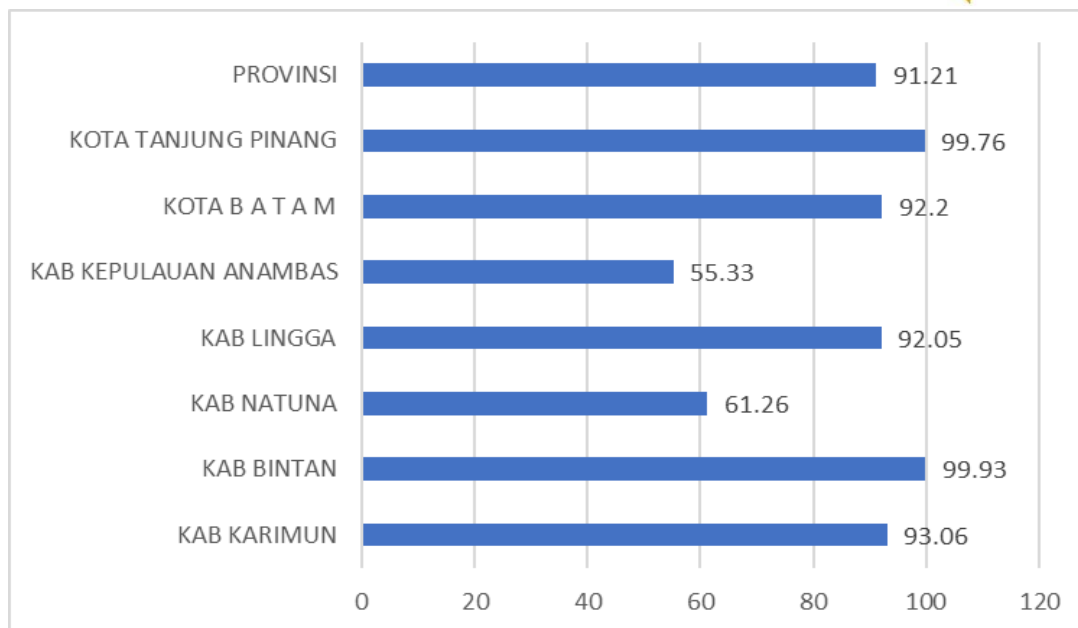
1. Pemantauan pertumbuhan

Pemantauan pertumbuhan adalah kegiatan penimbangan berat badan dan pengukuran Panjang atau Tinggi badan pada balita usia 0-59 bulan dilakukan setiap bulan di Posyandu serta pemantauan perkembangan melalui kegiatan SDIDTK. Penimbangan merupakan langkah awal dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Penimbangan yang rutin dilakukan setiap bulan di Posyandu, hal ini bertujuan untuk mengetahui atau deteksi dini apakah bayi /balita sakit atau tidak, kelengkapan Imunisasi dan mendapatkan penyuluhan gizi.

Cakupan penimbangan balita di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah 85,27% sedangkan target yang di tetapkan yaitu 85%. Target tersebut sudah tercapai akan tetapi dalam pencapaiannya masih terdapat beberapa kendala yaitu mindset yang berkembang adalah Posyandu hanya untuk menimbang berat badan dan memberikan vaksin anak. Hingga anak berusia 5 tahun, ibu harus rutin membawanya ke Posyandu. Para ibu terkadang tidak membawa anaknya ke Posyandu karena sudah PAUD. Mereka menganggap anaknya sudah sehat dan sudah bisa bersekolah sehingga tidak perlu lagi dibawa ke Posyandu. Hal ini tentu menjadi perhatian kita bersama bagaimana caranya menggiatkan lagi posyandu sebagai pusat pemantauan pertumbuhan balita yang diminati masyarakat.

2. Persentase sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting.

Persentase sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting pada tahun 2024 adalah 91,21%. Dari ke 7 Kabupaten/Kota tersebut terdapat 2 Kabupaten yang di bawah 80% yaitu Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Dari data bisa terlihat bahwa belum 100% balita di timbang di entry ke eppgbm. Kendala yang dialami dalam pencapaian indikator ini adalah kurangnya tenaga entry, signal tidak memadai, aplikasi selalu berkembang sehingga terkadang eror, sarana prasarana pendukung kurang memadai. Upaya yang dilakukan adalah melakukan validasi dan input bersama data setiap bulan, mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung.



Grafik 3.1
Persentase Pemantauan Intervensi Gizi Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

- Memastikan remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).

Penanganan stunting harus dilakukan dan hulu salah satunya dengan mempersiapkan status gizi rematri dan WUS yang nantinya akan menjadi calon ibu. Pemberian tablet tambah darah (TTD) pada remaja putri merupakan salah satu upaya pencegahan anemia pada remaja putri dan WUS, akan tetapi upaya ini belum berjalan maksimal karena masih terdapat remaja putri yang di berikan TTD tapi tidak dikonsumsi sesuai yang di anjurkan.

Angka kejadian anemia erat kaitannya dengan kepatuhan dalam mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD). Berdasarkan data tahun 2024 angka kepatuhan minum Tablet tambah Darah masih rendah dimana 86.292 remaja putri dari 94.711 remaja putri kita tidak mengonsumsi TTD sesuai anjuran. Penyebab tingginya prevalensi anemia remaja putri di Lingga adalah sekolah belum rutin melaksanakan kegiatan aksi bergizi, kepatuhan minum TTD pada remaja putri belum optimal, kebiasaan tidak sarapan pagi serta pola makan yang rendah protein dan tidak mengonsumsi sayuran hijau.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah membuat surat edaran gubernur tentang pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri, Optimalisasi pelaksanaan aksi bergizi di sekolah, pemberian TTD rutin seminggu sekali sepanjang tahun, pemantauan kepatuhan konsumsi TTD

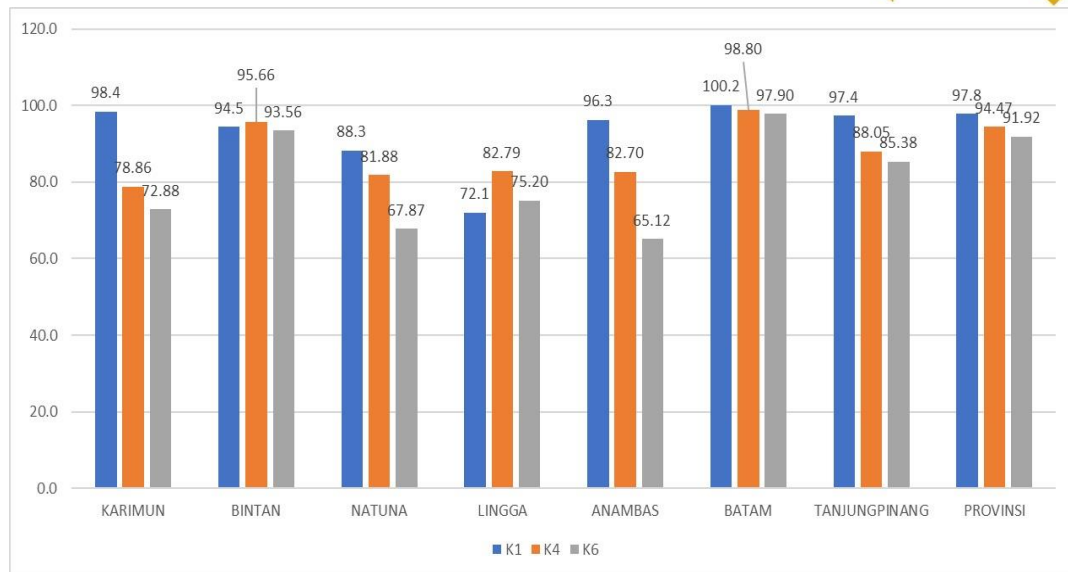
4. ANC yang belum berkualitas

Setiap ibu hamil berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai standar, yang diberikan oleh tenaga kesehatan, meliputi dokter (dokter umum dan/ atau dokter kandungan), bidan dan perawat, minimal empat kali selama masa kehamilan yaitu satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, dan dua kali pada trimester ketiga. Saat ini pelayanan kesehatan ibu hamil bahkan sudah diarahkan minimal 6 (enam) kali kunjungan selama kehamilan untuk meningkatkan deteksi dini pada ibu hamil, yaitu satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, dan tiga kali pada trimester ketiga dengan pemeriksaan oleh dokter minimal satu kali pada trimester pertama dan minimal satu kali pada trimester ketiga.

Ada 10 kriteria standar pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil (10T) yaitu : (1) Timbang berat badan dan ukur tinggi badan, (2) Ukur tekanan darah, (3) Nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas/LiLa), (4) Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri), (5) Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), (6) Skrining status imunisasi Tetanus Toxoid (TT) dan berikan imunisasi jika diperlukan, (7) Pemberian Tablet Tambah Darah minimal 90 tablet selama kehamilan, (8) Tes laboratorium (umum dan khusus), (9) Tatalaksana/ penanganan kasus sesuai kewenangan, dan (10) Temu wicara (konseling).

Pelayanan kesehatan ibu hamil bertujuan untuk mendeteksi secara dini penyakit atau gangguan yang diderita ibu hamil dan melakukan intervensi terhadap penyakit atau gangguan pada ibu hamil sedini mungkin. Ibu hamil mendapatkan pemeriksaan menyeluruh (riwayat kesehatan, riwayat perilaku beresiko, riwayat penyakit keluarga, pemeriksaan fisik, pemeriksaan USG, skrining preeklampsia, skrining diabetes mellitus gestasional, skrining status imunisasi TT). Selain itu ibu hamil juga mendapat konseling gizi, mendapat suplemen asam folat dan zat besi, serta pendidikan kesehatan yang tepat. Semua itu dilakukan agar ibu terhindar preeklampsia berat, Kurang Energi Kronis (KEK), anemia defisiensi besi, kejadian infeksi, serta bayi terhindar dari kelahiran dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) ataupun infeksi tokso/tetanus neonatorum yang dapat berujung pada kejadian stunting.

Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil Provinsi Kepulauan Riau digambarkan pada grafik berikut ini.



Grafik 3.2
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Cakupan K4 Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebesar 94,47% dan cakupan K6 sebesar 91,92%. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil di Provinsi Kepulauan Riau masih belum sesuai dengan yang diharapkan karena masih adanya pemeriksaan kehamilan yang belum dilaksanakan sesuai standar 10T, kondisi geografis yang membatasi akses ibu hamil terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil, sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang belum lengkap.

Tindakan ibu hamil dalam mengakses pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor, beberapa diantaranya adalah pengetahuan, pendidikan, jarak, dukungan dalam keluarga, sikap petugas pemberi pelayanan, umur, mobilitas penduduk, pekerjaan, dan pendapatan keluarga. Upaya dan strategi untuk mengawal konsistensi K1 harus terus dioptimalkan, beberapa diantaranya dengan mengoptimalkan kegiatan kunjungan rumah, kelas ibu hamil, pelibatan peran kader dan masyarakat dalam program P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi), peningkatan penggunaan dan pemanfaatan buku KIA. Selain itu, pemenuhan sarana dan prasarana dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan juga harus terus dilakukan.

Upaya sensitif yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

- Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait penyediaan akses air bersih dan sanitasi.

- Setiap keluarga miskin harus memiliki Jaminan Sosial berupa KIS (Kartu Indonesia Sehat)
- Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana terkait layanan kesehatan dan KB.
- Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
- Optimalisasi Pemanfaatan/Konsumsi Pangan Sayur, Buah dan Protein bersumber hewani kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan
- Kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan melalui program ketahanan pangan dan gizi.
- Meningkatkan konsumsi Ikan melalui Program Gemarikan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan

Selain upaya sensitif, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kesehatan dan jajarannya juga melakukan **upaya-upaya spesifik** dalam menangani permasalahan dan pencegahan stunting diantaranya :

- Pemberian bantuan F100 bagi balita kasus gizi buruk.
- Pelacakan kasus gizi buruk dan gizi kurang bagi balita yang tidak datang ke Posyandu melalui sweeping.
- Pemberian Suplemen Taburia pada balita stunting.
- Pengadaan Antropometri Kit Dalam Rangka Pemantauan Pertumbuhan.
- Perawatan kasus gizi buruk di Puskesmas dan Rujukan ke Rumah Sakit serta Pemantauan kasus gizi buruk pasca perawatan (Follow up).
- Distribusi dan Pemberian PMT lokal bagi Ibu Hamil dan Balita gizi kurang.
- Konseling pada keluarga melalui kunjungan rumah.
- Program 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) berupa pemberian tablet Fe (zat besi) pada Ibu Hamil, IMD, ASI Eksklusif, MP-ASI.
- Pemberian tablet Fe kepada Remaja putri dengan konsumsi 1 tablet perminggu sepanjang tahun.
- Konseling pra nikah kepada calon pengantin dengan berkerjasama dengan KUA.
- Integrasi program KIA – Gizi melalui Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita.
- Sosialisasi Gerakan AKSI BERGIZI di sekolah melalui media massa dan elektronik.
- Melakukan kegiatan GERCEP ANTING (Gerakan Cepat Pananganan Stunting) yaitu memberikan bantuan kepada keluarga Balita stunting di wilayah Kabupaten Lingga dan Kabupaten Karimun dengan tujuan untuk peningkatan status gizi.

- Melakukan kegiatan penanganan balita kurus dan bumil KEK dengan konsep pencegahan yang melibatkan anak sekolah SMA/SMK sederajat di Kabupaten Lingga dan Kabupaten Karimun.

Kedepannya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga akan terus mengupayakan agar upaya preventif dalam pencegahan stunting dikedepankan melalui perbaikan status gizi remaja putri, calon ibu, ibu hamil dan balita sehingga semakin dini stunting dideteksi maka penanganannya akan semakin mudah.



Gambar 3.1.
Pelaksanaan Penanggulangan Stunting di Provinsi Kepulauan Riau

3.1.2 Capaian Kinerja Indikator Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:



Untuk mencapai sasaran 1, diukur melalui pencapaian atas 9 indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Pengukuran Kinerja Sasaran 1
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 5 (Lima) Tahun (2021-2026)	Tahun 2024			
			Target	Capaian	%	Status Capaian
1.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	121	123	93	124	Sangat Baik
2.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	10	12	7.4	138	Sangat Baik
3.	Prevalensi Stunting	12.8	14	16.8*	80	Baik
4.	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	93	92	81	88	Baik
5.	Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	80	72	96	133	Sangat Baik
6.	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	71	71	100	141	Sangat Baik
7.	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	95.50	94.60	89.26	94	Baik
8.	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	97	95	97.60	103	Sangat Baik
9.	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	100	86	100	116	Sangat Baik

*Data Sementara Realisasi Prevalensi Stunting Tahun 2024

Dari 9 indikator yang menjadi pengukuran keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 (Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat) terdapat 6 indikator ada dalam kategori “sangat baik”, dan 3 indikator ada dalam kategori “baik”. Adapun penjelasan dan analisis per indikator kinerja diuraikan sebagai berikut:

1. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH

Salah satu indikator untuk melihat status kesehatan ibu dan anak di suatu wilayah ialah dengan menghitung indikator Angka Kematian Ibu (AKI) di wilayah tersebut. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian ibu di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 100.000 kelahiran hidup di wilayah dan kurun waktu yang sama.

Suatu kasus kematian bisa dikategorikan sebagai kasus kematian ibu jika terjadi pada perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan kecelakaan, bencana, cedera, atau bunuh diri.

Tabel 3.7.
Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI)
Berdasarkan Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022– 2024

No	Kabupaten/ Kota	Kematian Ibu					
		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Σ Kasus	AKI	Σ Kasus	AKI	Σ Kasus	AKI
1	Karimun	2	61	4	129	3	109
2	Bintan	3	108	4	155	1	41
3	Natuna	1	86	2	176	2	199
4	Lingga	3	248	1	89	6	588
5	Anambas	2	252	0	0	0	0
6	Batam	22	66	30	84	17	73
7	Tanjungpinang	5	146	6	179	3	97
	KEPRI	38	83 per 100.000 KH	47	98 per 100.000 KH	32	93 per 100.000 KH

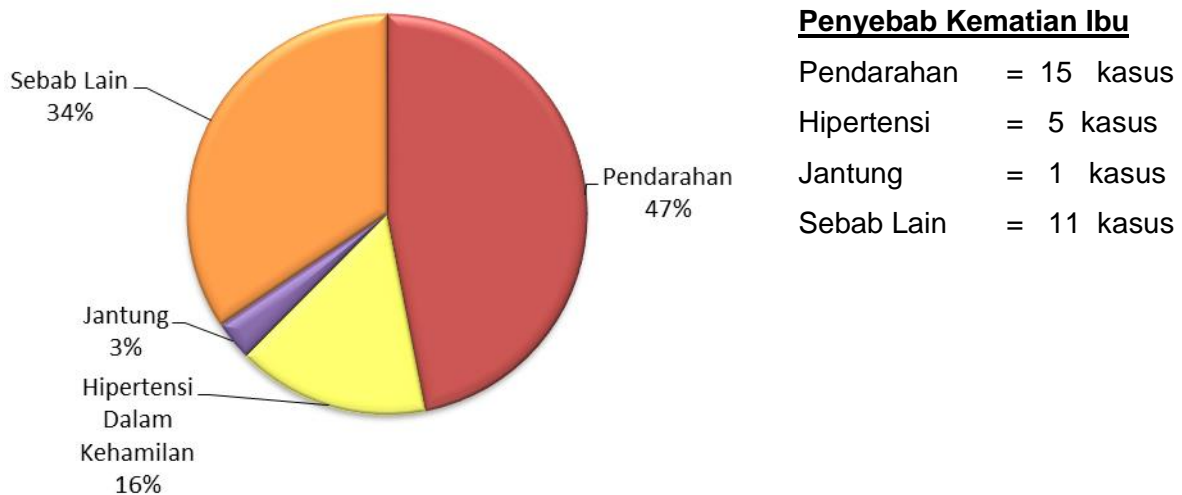
*Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

Berdasarkan Tabel 3.7 diketahui bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu dari 98 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 93 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan jumlah kasus kematian ibu mengalami penurunan dari 47 kasus menjadi 32 kasus.

Dilihat berdasarkan kabupaten/ kota diketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas berhasil mempertahankan kondisi 0 kasus kematian ibu pada 2 tahun terakhir yaitu Tahun 2023 dan Tahun 2024 dan ada 4 (empat) kabupaten/ kota yang mengalami penurunan jumlah kematian ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2024 yaitu Kabupaten Karimun, Bintan, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam. Sedangkan untuk 2 (dua) kabupaten/ kota lainnya yaitu Kabupaten Natuna dan Lingga mengalami kenaikan jumlah kematian ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI).

Kabupaten/ kota dengan Angka Kematian Ibu (AKI) terendah yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 0 per 100.000 kelahiran hidup (nol kasus) sedangkan tertinggi yaitu Kabupaten Lingga sebesar 588 per 100.000 kelahiran hidup.

Berikut ini proporsi dan jumlah kematian ibu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 berdasarkan penyebabnya.



Grafik 3.3
Penyebab Kematian Ibu Berdasarkan Penyebab di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Berdasarkan Grafik 3.6 diketahui bahwa penyebab terbanyak kematian ibu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah pendarahan yaitu sebesar 47% (15 kasus) dan sebab lain yaitu sebesar 34% (11 kasus).



Gambar 3.2.
Kegiatan Workshop AMPSR (Audit, Maternal, Perinatal, Surveilans dan Respon) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH

Indikator lainnya untuk melihat status kesehatan ibu dan anak di suatu wilayah selain Angka Kematian Ibu (AKI) ialah dengan menghitung indikator Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah tersebut. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup di wilayah dan kurun waktu yang sama. Suatu kasus kematian bisa dikategorikan sebagai kematian bayi jika terjadi pada bayi usia 0 – 11 bulan (termasuk neonatal).

Angka Kematian Bayi adalah jumlah kematian penduduk yang berusia dibawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu di suatu tempat. Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang berguna untuk mengetahui status kesehatan anak dan dapat mencerminkan kesehatan lingkungan, status kesehatan masyarakat dan tingkat perkembangan sosial ekonomi Masyarakat.

Tabel 3.8.
Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi (AKB)
Berdasarkan Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022 – 2024

No	Kabupaten/ Kota	Kematian Bayi					
		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		∑ Kasus	AKB	∑ Kasus	AKB	∑ Kasus	AKB
1	Karimun	38	12	37	12	24	8,7
2	Bintan	25	9	38	15	23	9,5
3	Natuna	28	24	15	13	15	14,9
4	Lingga	14	12	14	12	22	21,6
5	Anambas	12	15	8	10	6	8,1
6	Batam	89	3	131	4	129	5,5
7	Tanjungpinang	26	8	34	10	36	11,7
	KEPRI	232	5 per 1.000 KH	277	6 per 1.000 KH	255	7,4 per 1.000 KH
	ESTIMASI	-	10 per 1.000 KH	-	12 per 1.000 KH	-	-

*Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

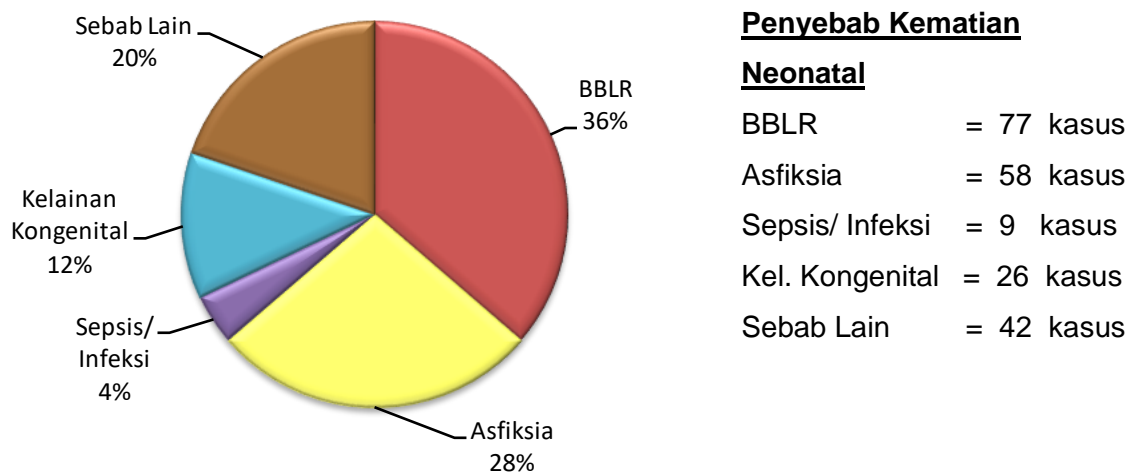
Berdasarkan Tabel 3.8 diketahui bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu dari 6 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 7,4 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan jumlah kasus kematian bayi mengalami penurunan dari 277 kasus menjadi 255 kasus. Hal ini terjadi karena beberapa hal, yaitu adanya penurunan data sasaran dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dari tahun sebelumnya, data yang digunakan adalah data riil masing-masing puskesmas, meningkatnya capaian KB Aktif dan adanya penurunan sasaran ibu bersalin sehingga mempengaruhi jumlah bayi baru lahir.

Dilihat berdasarkan kabupaten/ kota diketahui bahwa ada 3 (tiga) kabupaten/ kota yang mengalami penurunan jumlah kematian bayi dan Angka Kematian bayi (AKB) Tahun 2024 yaitu Kabupaten Karimun, Bintan, dan Kepulauan Anambas. Sedangkan untuk 3 (tiga) kabupaten/ kota lainnya yaitu Kabupaten Natuna, Lingga, dan Kota Tanjungpinang mengalami kenaikan jumlah kematian bayi dan Angka Kematian Bayi (AKB). Kota Batam mengalami penurunan jumlah kematian bayi tapi Angka Kematian Bayi (AKB) naik sedikit dibandingkan tahun 2023.

Kabupaten/ kota dengan Angka Kematian Bayi (AKB) terendah yaitu Kota Batam sebesar 5,5 per 1.000 kelahiran hidup sedangkan tertinggi yaitu Kabupaten Lingga sebesar 21,6 per 1.000 kelahiran hidup.

Berikut ini proporsi dan jumlah kematian bayi (neonatal dan post neonatal) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 berdasarkan penyebabnya

Grafik 3.4
Kematian Neonatal (Usia 0 – 28 hari) Berdasarkan Penyebab di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



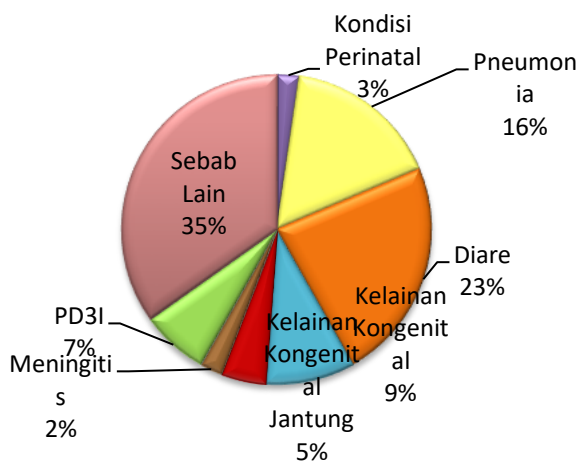
Penyebab Kematian

Neonatal

BBLR	= 77 kasus
Asfiksia	= 58 kasus
Sepsis/ Infeksi	= 9 kasus
Kel. Kongenital	= 26 kasus
Sebab Lain	= 42 kasus

Penyebab kematian neonatal (bayi usia 0 – 28 hari) pada tahun 2024 masih didominasi oleh BBLR sebesar 36% (77 kasus) dan asfiksia sebesar 28% (58 kasus). Sedangkan kematian post neonatal (bayi usia 29 hari – 11 bulan) didominasi oleh sebab lain (terdiri atas berbagai macam penyebab, beberapa diantaranya yaitu aspirasi, kejang demam, sepsis, dan lain sebagainya sebesar 35% (15 kasus) dan diare sebesar 23% (10 kasus).

Grafik 3.5
Kematian Post Neonatal (Usia 28 hari – 11 bulan) Berdasarkan Penyebab di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



Penyebab Kematian

Post Neonatal

Kond. Perinatal	= 1 kasus
Pneumonia	= 7 kasus
Diare	= 10 kasus
Kel. Kongenital	= 4 kasus
Kel. Jantung	= 2 kasus
Meningitis	= 1 kasus
PD3I	= 3 kasus
Sebab Lain	= 15 kasus

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yaitu :

1. Masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta alat kesehatan di sebagian fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Salah satunya yaitu alat USG, logistik pemeriksaan laboratorium bagi ibu, bayi, dan calon pengantin, alat stabilisasi ibu dan bayi dengan komplikasi, fasilitas dalam ambulans sebagai sarana rujukan kegawatdaruratan;
2. Sistem rujukan maternal neonatal yang belum berjalan optimal;
3. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) di kabupaten/ kota belum optimal, efektif, dan sesuai dengan yang diharapkan dalam hal jumlah atau frekuensi pertemuan dan jumlah kasus yang dikaji serta belum menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti;
4. Masih adanya pelayanan kesehatan ibu hamil yang belum memenuhi standar dan pemeriksaan yang belum adekuat sehingga belum mampu melakukan pendeteksian risiko komplikasi pada ibu hamil. Untuk meningkatkan kualitas

pelayanan kesehatan ibu hamil dalam pendeteksian risiko komplikasi pada ibu hamil, saat ini dibuat kebijakan pelayanan kesehatan ibu hamil 6 kali (K6) dengan pemeriksaan oleh dokter minimal 1 (satu) kali pada trimester pertama dan 1 (satu) kali pada trimester kedua disertai dengan pemeriksaan kehamilan menggunakan USG oleh dokter. Terdapat kesenjangan cakupan antar kabupaten/ kota dikarenakan belum meratanya dokter terlatih USG di puskesmas, dan keterbatasan akses pelayanan USG bagi ibu hamil yang berdomisili di pulau – pulau;

5. Masih adanya persalinan yang ditolong oleh non tenaga kesehatan dan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di non fasilitas pelayanan kesehatan. Masih banyak masyarakat di wilayah pulau – pulau di kabupaten/ kota yang lebih memilih untuk bersalin di rumah karena berbagai macam alasan diantaranya faktor tradisi yang turun menurun, wilayah kepulauan yang membuat jarak antara rumah dengan fasilitas pelayanan kesehatan cukup jauh dan moda transportasi yang kurang memadai, fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang memadai dalam pelayanan persalinan dan pelayanan bayi baru lahir;
6. Masih belum meratanya distribusi tenaga kesehatan spesialis seperti dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak, dokter spesialis anestesi, dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter spesialis lainnya. Dokter spesialis banyak terdistribusi di daerah perkotaan sedangkan di daerah DTPK seperti Kabupaten Kepulauan Anambas masih minim;
7. Program kesehatan reproduksi calon pengantin yang belum berjalan optimal.

Beberapa solusi yang perlu dilakukan untuk menangani permasalahan yang dihadapi dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Kepulauan Riau antara lain :

1. Melengkapi sarana prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau puskesmas dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Salah satunya yaitu alat USG, logistik pemeriksaan laboratorium bagi ibu, bayi, dan calon pengantin, alat stabilisasi ibu dan bayi dengan komplikasi, fasilitas dalam ambulans sebagai sarana rujukan kegawatdaruratan;

2. Optimalisasi sistem rujukan penanganan kasus komplikasi pada ibu dan bayi melalui penyusunan SOP sistem rujukan kesehatan ibu dan anak, termasuk di dalamnya penunjukan dokter spesialis kandungan dan anak sebagai penanggungjawab wilayah yang memberikan arahan kepada tenaga kesehatan di wilayah kerja puskesmas untuk stabilisasi pasien ibu dan bayi sebelum merujuk;
3. Melakukan kegiatan Audit Maternal Perital (AMP) sebagai proses pembelajaran kasus kematian ibu dan bayi agar tidak terulang lagi dengan kasus yang sama. Perencanaan kegiatan Audit Maternal Perital (AMP) di tingkat kabupaten/ kota harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu minimal 4 kali dalam setahun dan semua kasus dikaji. Pelaksanaan Audit Maternal Perital (AMP) dapat diselenggarakan menggunakan dana DAK Fisik Kabupaten/ Kota dengan menu Surveilans dan Tatalaksana Kesehatan Ibu dan Bayi;
4. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Beberapa diantaranya yaitu pelatihan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, pelatihan integrasi Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan gizi buruk, pelatihan penanganan asfiksia dan BBLR, pelatihan dokter dalam pelayanan KIA termasuk penggunaan USG, pelatihan bidan dalam pelayanan KIA, dan pelatihan lainnya;
5. Peningkatan koordinasi dengan organisasi profesi (POGI, IBI, IDAI, dll) dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, salah satunya kolaborasi dengan IDAI dalam pelaksanaan Pedistrician Social Responsibility (PSR);
6. Pelaksanaan refreshing deteksi risiko dini dan penapisan faktor risiko ibu dan bayi bagi bidan – bidan di wilayah kerja puskesmas;
7. Penguatan peran lintas sektor dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan pemberdayaan masyarakat dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), salah satunya kolaborasi dengan Kementerian Agama terkait upaya pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin dan menginisiasi penyusunan SE Gubernur terkait pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin;
8. Mendorong kabupaten/ kota dalam pembentukan jejaring, skrining layak hamil, ANC, dan stunting; dan

9. Optimalisasi dan monitoring pemanfaatan JKN, DAK, Dekonsentrasi untuk penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).



Gambar 3.3.
Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) Manajemen Terpadu Balita Sakit dan
Tata Laksana Gizi Buruk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

3. Prevalensi Stunting

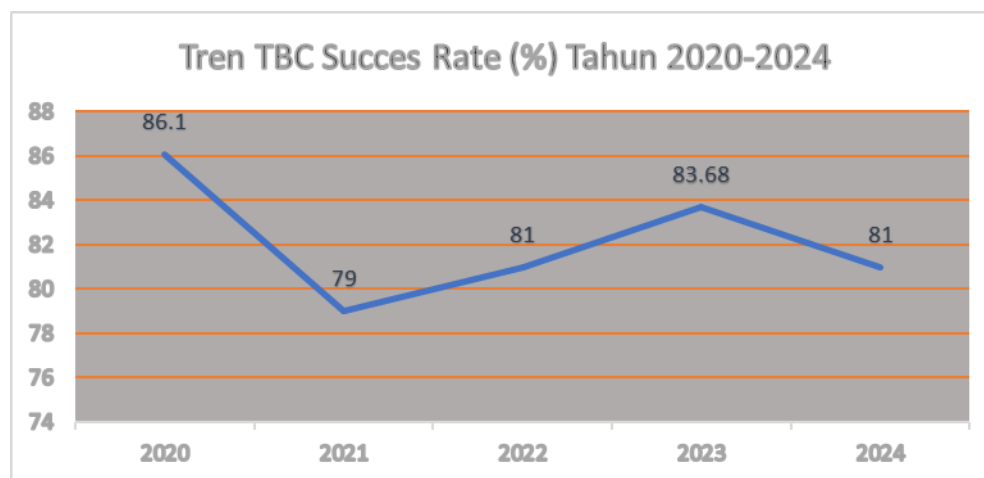
Prevalensi stunting merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan telah dijelaskan pada poin 3.1.1.

4. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Success Rate*)

Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah kesehatan nasional maupun global yang menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang mempunyai beban Tuberkulosis (TBC) tinggi dan menempati posisi ke-2 di dunia saat ini setelah India, selain itu, kasus TBC-MDR, TB-HIV, TB-DM, TBC pada anak, Infeksi Laten TBC dan kelompok masyarakat rentan lainnya juga semakin bertambah dan menjadi tantangan.

Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus adalah jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Dengan demikian, angka keberhasilan pengobatan TBC merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus ditambah angka pengobatan lengkap semua kasus. Semakin tinggi angka keberhasilan kasus TBC maka menggambarkan semakin tinggi kualitas pengobatan TBC.

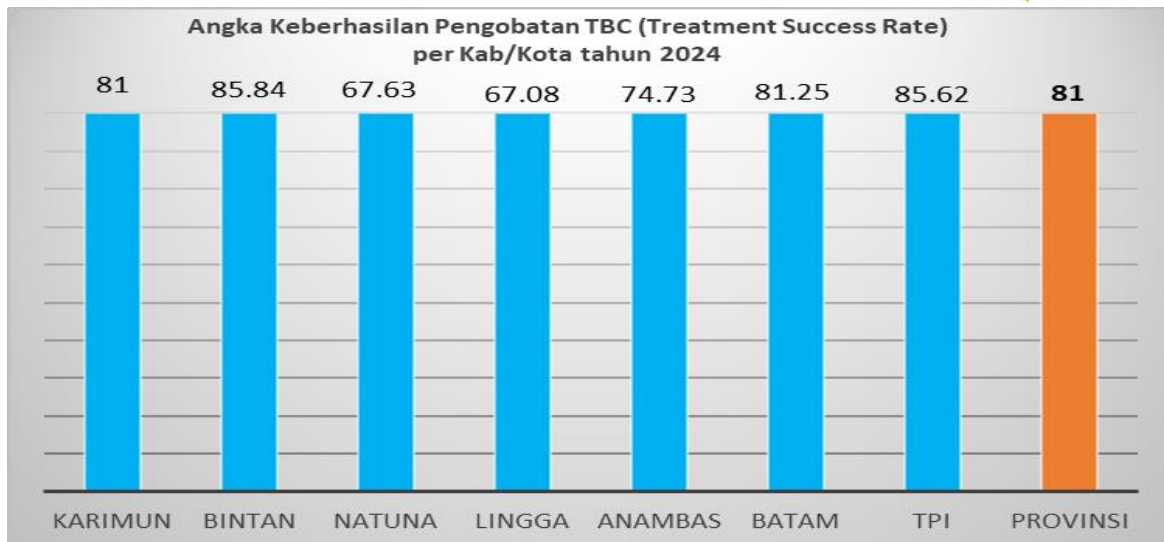
Pada tahun 2024, Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Success Rate*) di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 81% (kategori baik). Angka ini belum memenuhi target Indikator Kinerja sebesar 92%.



Grafik 3.6.
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Success Rate*)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Angka *success rate* dari tahun 2020 hingga tahun 2024 fluktuatif. Untuk capaian tertinggi berada di tahun 2020 yaitu 86,1%. Jika dilihat data ditahun 2020 capaian *success rate* belum mencapai target nasional program TBC 90%, tetapi karena pandemi Covid 19 di tahun 2020 sehingga capaian *success rate* mengalami penurunan yaitu sebesar 79% dan pada tahun 2022 mulai meningkat pada angka capaian yaitu 81%, pada tahun 2023 capaian TBC *success rate* mengalami peningkatan pada angka 83,68%. Data TBC *success rate* tahun 2024 yang disajikan berdasarkan penemuan pengobatan pasien pada bulan Januari 2024 sampai Desember 2024 (Sumber Data : Dashboard SITB dan TBC 08 SITB per tanggal 06 Januari 2025).

Untuk data sebaran TBC *success rate* tiap Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Grafik 3.7

Angka Keberhasilan Pengobatan TBC Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yaitu :

1. Kurangnya kepatuhan pasien dalam menyelesaikan pengobatan sesuai waktu yang telah ditentukan,
2. Ketidakteraturan pasien dalam menjalani pengobatan, akibat kurangnya dukungan dr pihak keluarga,
3. Masih adanya stigma terhadap pasien TBC sehingga menyebabkan adanya diskriminasi dalam masyarakat, dan
4. Lamanya pengobatan TBC (6-24 bln) menyebabkan terjadinya efek samping obat dan berpotensi terjadi putus berobat.

Beberapa solusi atau rencana tindaklanjut yang perlu dilakukan dalam menangani permasalahan tersebut antara lain :

1. Peran aktif masyarakat (kader) dalam pengawasan menelan obat (PMO),
2. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota telah melakukan koordinasi rutin dengan Komunitas (SR Penabulu dan SSR di Kabupaten/ Kota : SSR Lintas Nusa Kota Batam, PKBI Tanjungpinang dan Erince Karimun) untuk memastikan pasien memulai pengobatan dan dalam pelacakan pasien putus berobat atau mangkir untuk kembali berobat, dan

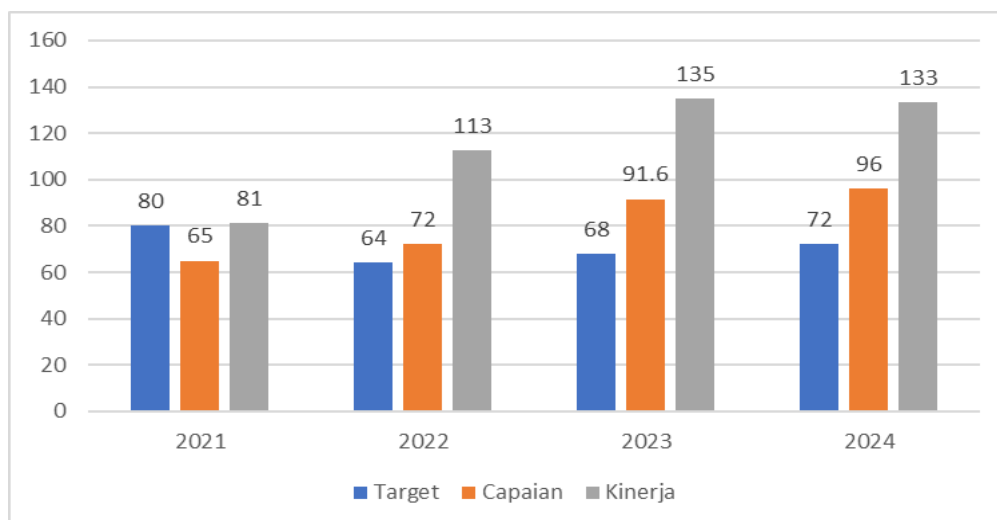
3. Perlu adanya edukasi dari petugas di fasyankes tentang penyakit TBC, bahwa TBC dapat disembuhkan dengan syarat harus meminum obat TBC secara teratur dan sesuai dosis sehingga tidak timbul stigma dan diskriminasi terhadap pasien TBC.

5. Capaian ODHA Yang Mendapatkan ARV

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan HIV AIDS dan IMS penetapan sasaran HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV diantaranya yaitu pasien TBC, pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), pekerja seks, LSL, waria, penasun, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), dan ibu hamil.

Pada tahun 2024 Capaian ODHA yang mendapatkan ARV sebesar 96%. Angka ini sudah di atas target Kinerja sebesar 72% dengan capaian kinerja sebesar 133% (kategori sangat baik).



Grafik 3.8.
Capaian ODHA yang mendapatkan ARV
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

Dari grafik 3.8 diatas dapat dilihat bahwa capaian persentase ODHA yang mendapatkan pengobatan ARV Tahun 2021 dari target 80% dengan capaian masih di angka 65% sehingga didapatkan capaian kinerja pada indikator tersebut pada tahun 2021 adalah sebesar 81%. Sedangkan tahun 2022 target turun menjadi 64% sementara capaian naik menjadi 72%, dan capaian kinerja program 113%. Pada tahun 2023 target naik menjadi 68% dengan capaian 91,6% sehingga didapatkan capaian kinerja 135%. Pada tahun 2024 target naik menjadi 72% dengan capaian 96%, dan didapatkan capaian kinerja 133%.

Beberapa kendala dalam upaya pencapaian pengendalian HIV Sebagai Berikut:

1. Pengaruh kurangnya mobile klinik VCT dan gerakan rujukan dari LSM sehingga tidak dapat menjangkau populasi umum dan khusus untuk melakukan screening di pelayanan kesehatan,
2. Klinik PDP Masih terbatas sehingga pelayanan pemberian ARV masih belum maksimal,
3. Reagen pemeriksaan ARV masih bergantung dari pusat,
4. Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia, dan
5. Mesin pemeriksaan Viral Load untuk mendukung kepatuhan ARV belum maksimal.

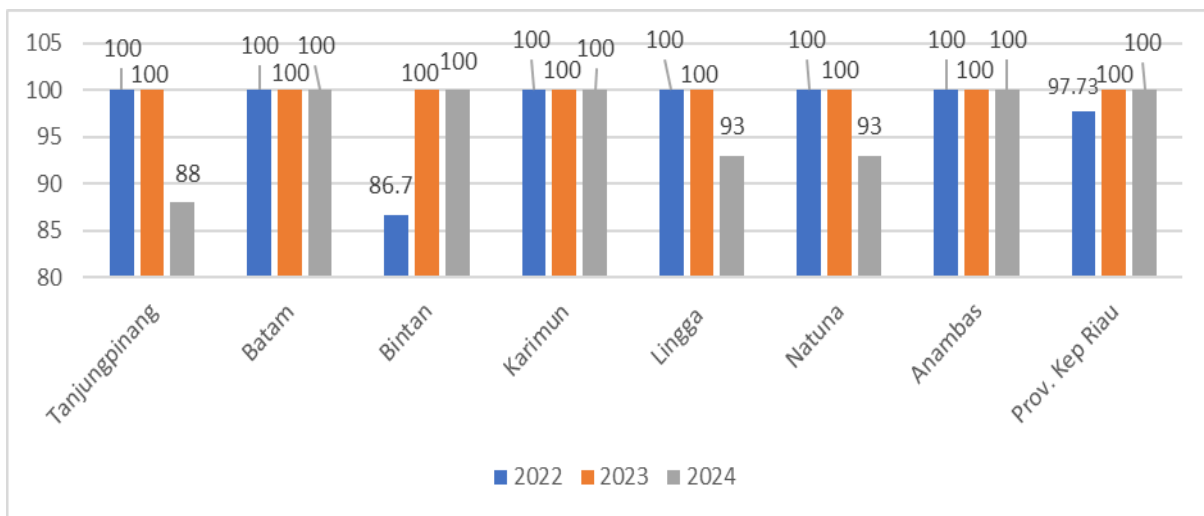
Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan upaya pengendalian HIV adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perluasan Layanan PDP di 7 Kabupaten/Kota untuk memudahkan akses perawatan dan pengobatan ODHIV,
2. Melakukan skrining HIV pada semua populasi beresiko,
3. Melakukan perluasan Layanan PrEP (*Pra Exposure Profilaksis*) / Layanan Pencegahan Pra Pajanan dalam upaya pencegahan HIV pada populasi beresiko tinggi (WPS, LSL dan Pelanggan PS),
4. Mengimplementasikan pelayanan TB-HIV satu pintu (*TB-HIV One Stop Services*) pada beberapa layanan terpilih, dan
5. Melakukan pemeriksaan Viral Load HIV pada semua ODHIV on ART yang ada di Provinsi Kepri untuk melihat keberhasilan pengobatan ARV.

6. Jumlah Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM di Atas >= 80% Puskesmas

Kegiatan PANDU PTM adalah kegiatan penemuan dan penanganan kasus PTM dan manajemen faktor risiko PTM di FKTP secara terpadu. Kegiatan manajemen faktor risiko meliputi pemeriksaan perilaku merokok, obesitas, Tekanan Darah > 120/80 mmHg, gula darah sewaktu > 200 mg/dL, kolesterol atau kolesterol rata-rata, wanita usia 30-50 tahun atau wanita yang pernah berhubungan seksual.

Pada grafik bawah ini dijabarkan sebaran capaian Pandu PTM Menurut Kabupaten/Kota tahun 2024.



Grafik 3.9
 Capaian Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pandu PTM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 - 2024

Dari grafik diatas dapat dilihat capaian PANDU PTM Tahun 2024 yang 100% ada di Kabupaten Karimun, Bintan, Kep. Anambas, dan Kota Batam. Sedangkan capaian sebesar 93% terdapat di Kabupaten Natuna dan Lingga, serta capaian sebesar 88% terdapat di Kota Tanjungpinang, hal ini dikarenakan adanya penambahan puskesmas baru, sehingga pengelola programnya belum pernah mengikuti pelatihan PANDU PTM. Capaian PANDU PTM di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebesar 97,73%, tahun 2023 yaitu 100%, sedangkan tahun 2024 yaitu 100%. Dikatakan capaian 100% jika kab/kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas.



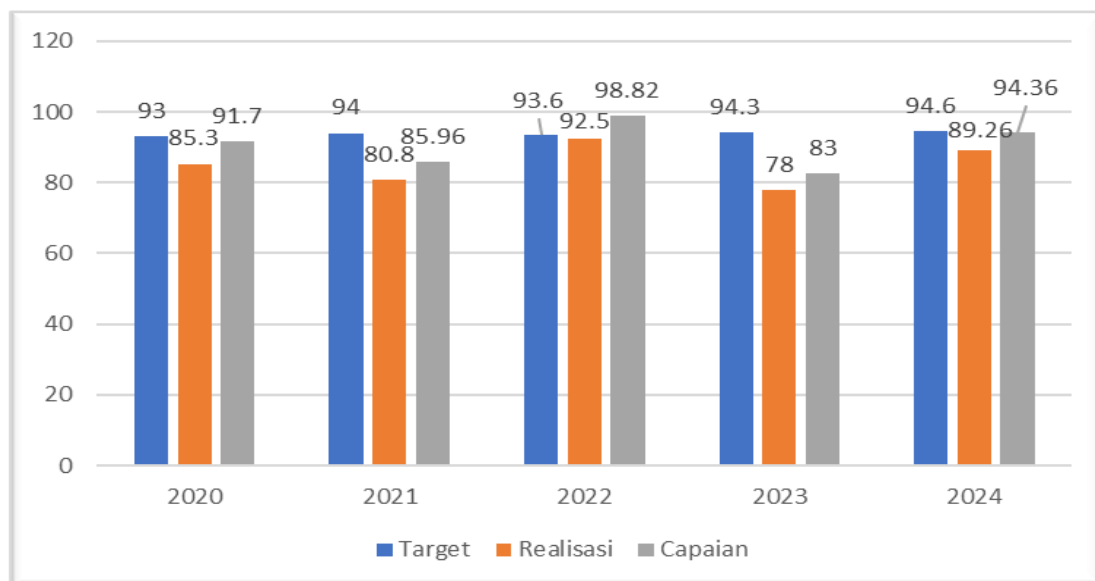
Gambar 3.4.
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pandu PTM di Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Kegiatan yang mendukung capaian ini antara lain monitoring dan evaluasi program PTM ke Kabupaten/Kota bersumber APBN serta pendampingan deteksi dini PTM dan pendampingan deteksi dini Kanker Leher Rahim bersumber APBD. Namun demikian masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Pandu PTM di FKTP antara lain capaian Skrining yang dicatat masih rendah di beberapa Kab/Kota, selisih antara data manual dan aplikasi ASIK masih sangat tinggi dan sistem pelaporan belum terintegrasi, angka faktor risiko PTM masih tinggi, serta capaian Hipertensi terkontrol dan DM Terkontrol masih rendah. Selain itu petugas yang *double Job*, keterbatasan anggaran, dan sarana prasarana PTM belum memadai khususnya krioterapi juga perlu diperhatikan. Tantangan terakhir adalah masih kurangnya minat masyarakat untuk skrining PTM khususnya kanker leher Rahim. Menghadapi tantangan tersebut, Dinas Kesehatan Kepulauan Riau melalui Tim Kerja PTM berinisiatif melaksanakan beberapa kegiatan tambahan. Kegiatan yang dimaksud tidak dipenuhi oleh anggaran APBD yang tersedia, namun pengelola program dapat menyesuaikan tugas dengan melaksanakan *on the job training (OJT)* tenaga kesehatan untuk HPV DNA & IVA *co-testing* pada 53 Puskesmas di 5 Kab/kota serta pemenuhan BMHP seperti HPV DNA BMHP HPV

DNA dan pengadaan thermal ablation melalui DAK/Banper. Selain itu, deteksi dini juga dilakukan juga oleh Tim PTM pada kegiatan berskala provinsi dengan berkoordinasi dengan kabupaten/kota setempat.

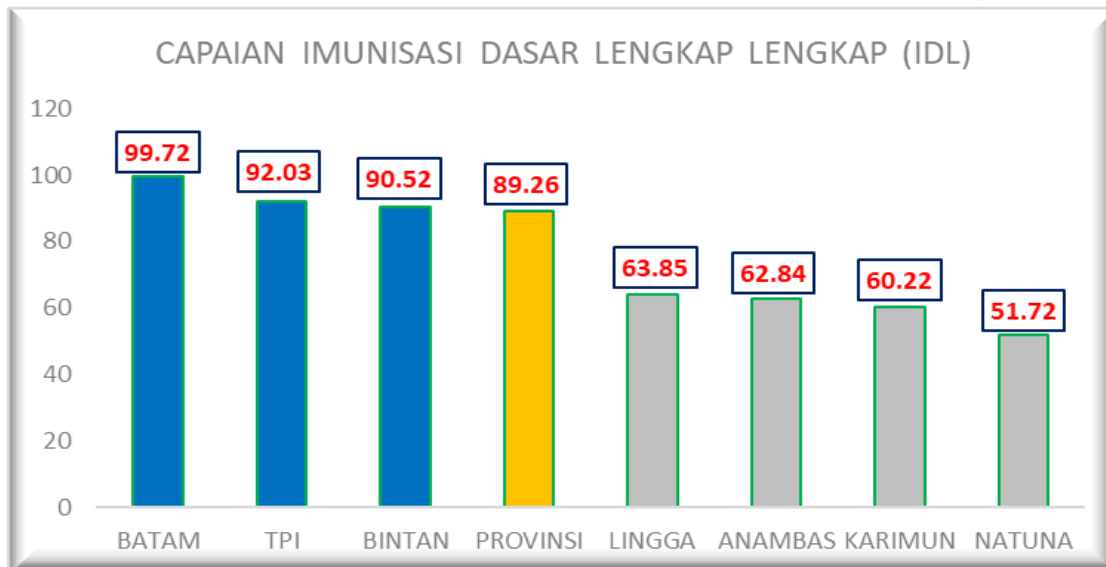
7. Persentase Usia 0-11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Imunisasi sebagai salah satu upaya cost efektif mencegah terjadinya penyakit menular dan menurunkan angka kematian pada anak khususnya akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Untuk itu cakupan imunisasi harus dipertahankan tinggi dan merata di seluruh wilayah yang bertujuan untuk menghindarkan terjadinya daerah kantong yang akan mempermudah terjadinya kejadian luar biasa (KLB). Untuk mendeteksi dini terjadinya peningkatan kasus penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, Imunisasi perlu didukung oleh upaya surveilans epidemiologi.



Grafik 3.10
Persentase Usia 0-11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi cakupan imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Provinsi Kepri tahun 2024 adalah 89,26%. Jika dibandingkan dengan capaian IDL tahun 2023 yakni 78%, maka capaian IDL Provinsi Kepri 2024 mengalami peningkatan.



Grafik 3.11
Persentase Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas, capaian persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar 89,26% masih rendah bila dibandingkan dengan target sebesar 94,60%. Hal ini terlihat dari capaian 7 (tujuh) Kab/Kota pada tahun 2024 hanya Kota Batam yang mencapai target Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) sebesar 99,72% bila dibandingkan dengan target sebesar 94,60%.

Ada beberapa hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan imunisasi di lapangan seperti Kondisi aplikasi ASIK yang belum running well dan kondisi sinyal internet di daerah yang belum semuanya baik/lancar; Masih ada penolakan dari masyarakat terhadap imunisasi, termasuk penolakan terhadap Suntikan Ganda; Banyaknya aplikasi yang juga harus dikerjakan oleh petugas imunisasi/bidan di puskesmas; dan Koordinasi antara petugas imunisasi dan Kesga di lapangan kurang maksimal, Tugas ganda dari Petugas Imunisasi di puskesmas selain sebagai penanggungjawab program imunisasi serta Kurangnya dukungan Lintas Sektor/Program di daerah.



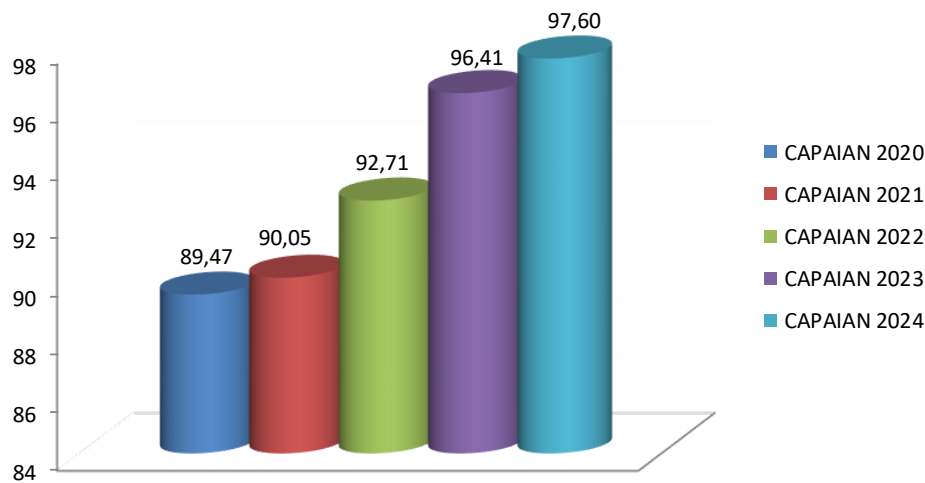
Gambar 3.5.

Pelaksanaan Imuisasi Dasar Lengkap (IDL) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Beberapa upaya penanggulangan yang sudah dilakukan antara lain Mendorong petugas imunisasi untuk Input Data ASIK sec. Real-Time; Sosialisasi dan Edukasi Imunisasi sec. Masif (Suntikan Ganda, Antigen Baru) Jejaring dgn PKK, Kader, Toma/Toga; Menjaring/mencari sasaran yang belum lengkap imunisasi-nya dengan Sweeping, Drop-out Follow Up (DOFU), Survei Cepat Komunitas (SCK); Menskrining seluruh Ibu Hamil yang ada di wilker puskesmas dan Catat Capaiannya ke Register/Kohort Ibu, menunjuk Admin ASIK dan PJ Penginput ASIK tiap fasyankes (saat ini sdh ada Helpdesk ASIK Provinsi), Bimbingan Teknis/Pendampingan dalam Pelaksanaan Imunisasi Rutin/Kejar → Desk Review, Monev, kordinasi pribadi serta Membuat Umpan Balik Capaian Imunisasi (ASIK) ke grup Forkom Imunisasi, Lintas Sektor/Program se-Kepri.

8. Persentase Penduduk Dengan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS

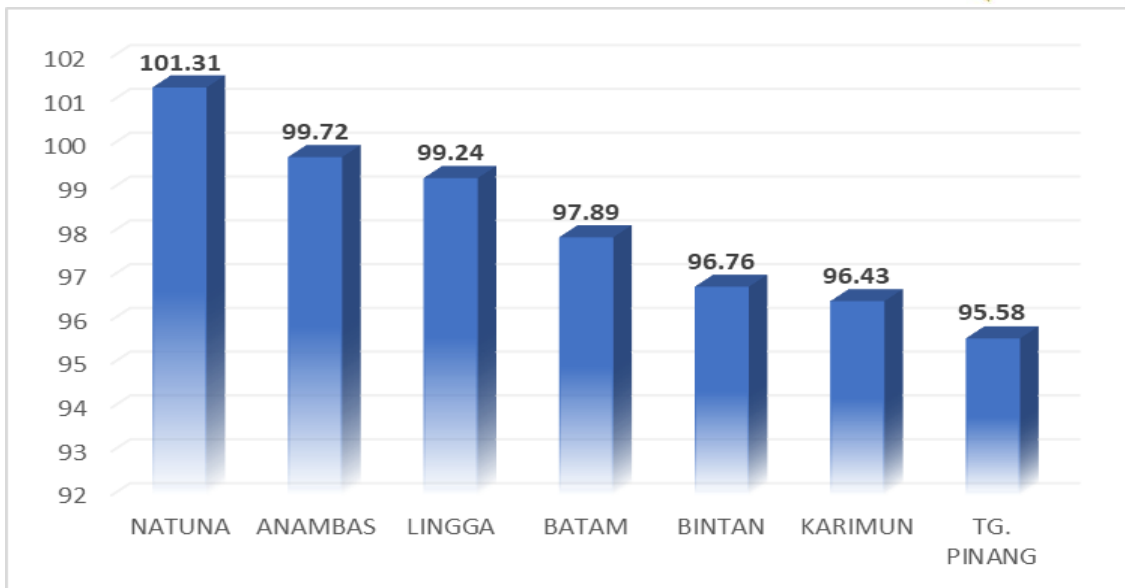
Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasioanl (JKN) di Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah daerah terus berkomitmen dan berupaya meningkatkan cakupan kepesertaan JKN serta akses pelayanan kesehatan secara komprehensif, integratif dan sistematis. Cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 telah mencapai 97,60% (2.166.857 jiwa) dari total penduduk Provinsi Kepulauan Riau (2.220.043 jiwa), masih tersisa 8.880 jiwa (0,4% penduduk) untuk mencapai target UHC Nasional. Bila dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah capaian kepesertaan JKN Provinsi Kepulauan Riau meningkat sebesar 1,19% (sebanyak 93.781 jiwa)



Grafik 3.12.
Capaian JKN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Capaian JKN Provinsi Kepulauan Riau terus meningkat setiap tahunnya, peningkatan ini disebabkan karena komitmen dan dukungan yang kuat dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Program JKN. Bahkan beberapa Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga telah mencapai UHC 98% pada tahun 2024. Dukungan Pemerintah baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota terus meningkat setiap tahunnya, guna mencapai tujuan *Universal Health Coverage* yaitu setiap warga mendapatkan akses yang adil terhadap layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

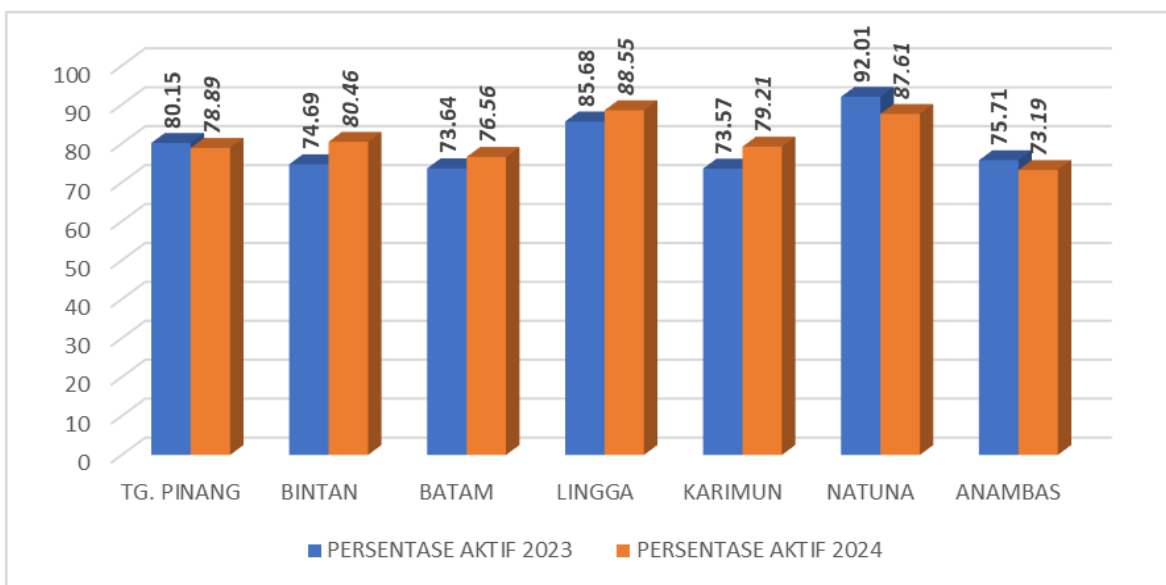
Capaian kepesertaan JKN Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3.13.
 Capaian *Universal Health Coverage* (UHC) per Kabupaten/Kota
 Provinsi Kepulauan Riau 2024

Meskipun capaian cakupan peserta telah mencapai 2.166.857 jiwa atau 97,60% dari total penduduk, namun capaian kepesertaan aktif baru mencapai 76,48% dari jumlah penduduk atau 78,36% dari keseluruhan peserta. Peserta JKN aktif tahun 2024 tumbuh sebanyak 3% dibanding 31 Desember 2023.

Sebaran keaktifan peserta JKN per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3.14
 Persentase Peserta JKN Aktif per Kabupaten/Kota
 Provinsi Kepulauan Riau 2023-2024

Berdasarkan grafik di atas terlihat 3 Kabupaten/Kota dengan peserta JKN aktif tahun 2024 menurun yaitu Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas. Capaian Peserta aktif tertinggi terdapat di Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Bintan dengan capaian di atas 80%. Peserta JKN aktif terendah terdapat di Kabupaten Anambas yaitu sebesar 73,19%.

Cakupan peserta JKN Provinsi Kepulauan Riau yang terus meningkat masih terdapat beberapa masalah dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yaitu:

1. Defisit keuangan
2. Belum optimalnya verifikasi dan validasi data kependudukan.
3. Belum meratanya data dan sistem informasi.

Sedangkan solusi/faktor penentu keberhasilan terhadap capaian Kepesertaan JKN di Provinsi Kepulauan Riau antara lain :

1. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah baik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan capaian UHC.
2. Komitmen PEMDA dalam Pengintegrasian Penduduk ke dalam JKN.
3. Optimalisasi data Kependudukan di Provinsi Kepulauan Riau
4. Pemerataan data dan informasi di setiap daerah.
5. Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota bersama BPJS terus melakukan evaluasi terhadap capaian kepesertaan JKN dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC).



Gambar 3.6
Penyerahan Bantuan Premi BPJS/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

9. Persentase Kab/Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

Berdasarkan PMK No. 13 Tahun 2022, Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan Gernas adalah Kabupaten dan Kota yang memiliki regulasi terkait Gernas dan melaksanakan 2 dari 3 kegiatan berikut :

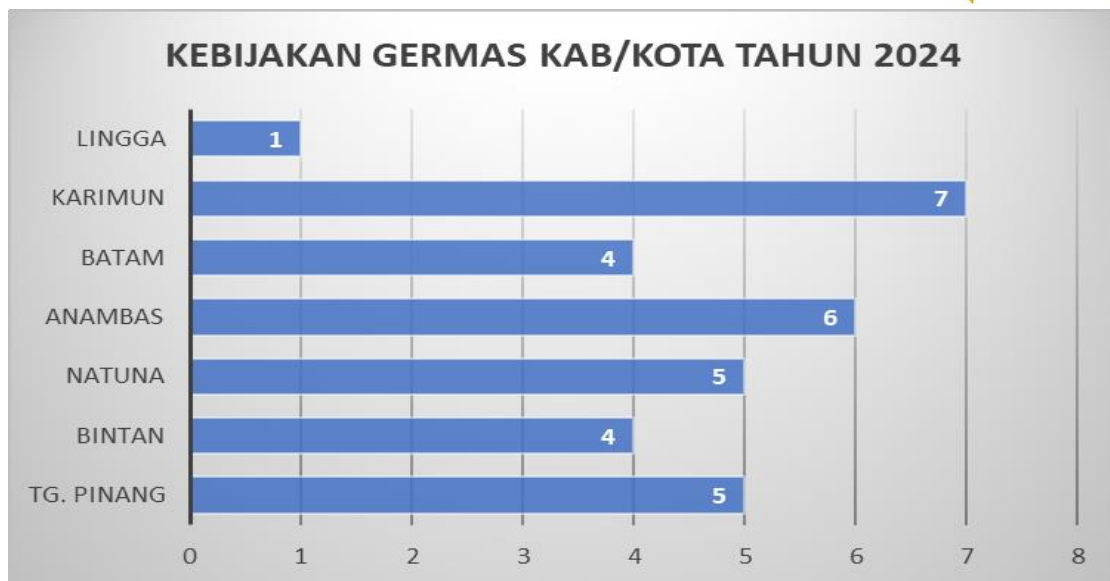
1. Melaksanakan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan tema prioritas
2. Melaksanakan kegiatan skrining kesehatan di tempat kerja
3. Melaksanakan kegiatan pembinaan Kesehatan tradisional

Tabel 3.9.
Kabupaten Kota yang menerapkan kebijakan GERMAS

No	Kabupaten/Kota	Kabupaten Kota yang menerapkan kebijakan GERMAS			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Karimun	-	√	√	√
2	Bintan	√	√	√	√
3	Natuna	√	√	√	√
4	Lingga	√	√	√	√
5	Anambas	-	√	√	√
6	Batam	√	√	√	√
7	Tanjungpinang	√	√	√	√
	Jumah Kab/Kota yang menerapkan kebijakan GERMAS	5 kab/kota	7 kab/kota	7 kab/kota	7 kab/kota

Dari tabel diatas diketahui bahwa terjadi peningkatan persentase Kab/Kota menerapkan Kebijakan Gernas Tahun 2021 dan tahun 2022. Tahun 2021 baru terdapat 5 Kabupaten Kota yang memenuhi kriteria ini. Di tahun 2022, 2023 dan 2024, seluruh Kabupaten Kota telah menerapkan Kebijakan Gernas berdasarkan target 2024 sebesar 86 %, maka indikator ini terealisasi sebesar 100 %.

Dalam kriteria jumlah kebijakan Gernas, Seluruh Kabupaten Kota tahun 2024 telah memiliki kebijakan Gernas. Total 32 Kebijakan yang dilaporkan seluruh Kabupaten/Kota di tahun 2024 melalui aplikasi microsite promkes Kemenkes RI dengan rincian :



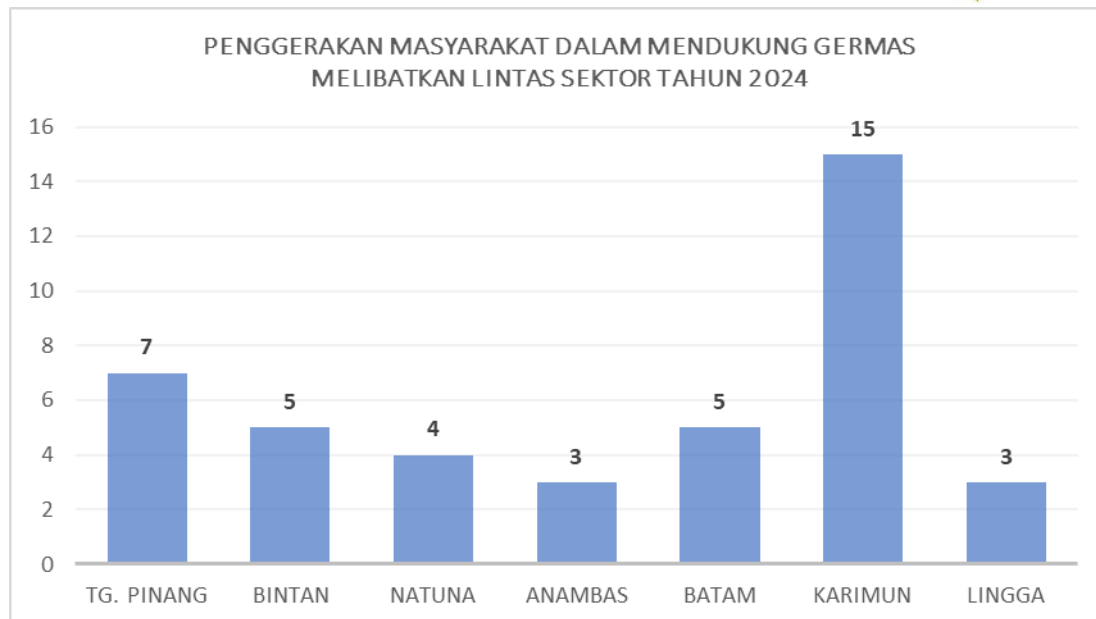
Grafik 3.15
Jumlah Kebijakan GERMAS per Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Jumlah kebijakan terkait GERMAS dan Kebijakan Berwawasan Kesehatan terbanyak dari Kab. Karimun yaitu 7 Kebijakan, disusul oleh Kabupaten Kepulauan Anambas dengan 6 Kebijakan sementara Kab. Lingga hanya menginput 1 kebijakan GERMAS di tahun 2024.

Kriteria berikutnya adalah melaksanakan kampanye GERMAS dengan tema prioritas yaitu :

1. Kampanye Aksi Bergizi
2. Kampanye Posyandu Aktif
3. Kampanye Ibu Hamil Sehat
4. Kampanye Pencegahan Stunting
5. Kampanye Jambore Kader
6. Kampanye Vaksinasi Bersama mitra
7. Kampanye pencegahan penyakit menular dan tidak menular
8. Kampanye Kesehatan Jiwa
9. Kampanye Kesehatan Olahraga

Adapun rincian jumlah kampanye yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

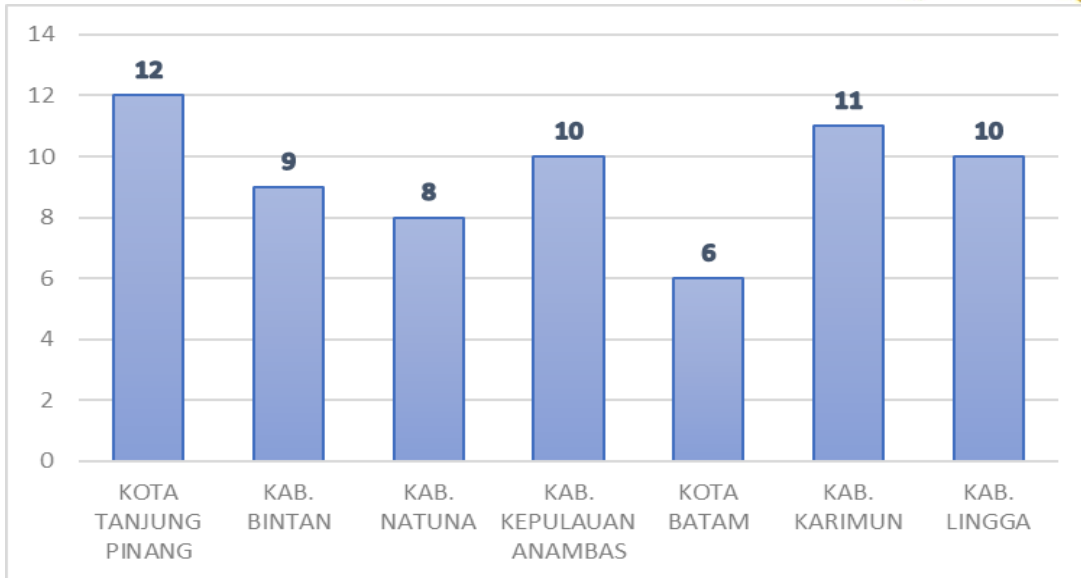


Grafik 3.16
Jumlah Kampanye per Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Riau 2024

Laporan kegiatan kampanye yang dilakukan Kab/Kota diinput kedalam aplikasi microsite dan akan dilakukan verifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Direktorat Promkes Kemenkes RI. Tidak semua kampanye yang dilakukan dan diinput dapat diverifikasi. Kampanye tersebut harus memenuhi beberapa kriteria kegiatan yang terlaksana didalamnya.

Dari Grafik tersebut, terlihat bahwa terdapat 42 kegiatan kampanye yang diinput dan memenuhi kriteria dimana Kabupaten Karimun menjadi Kabupaten Kota terbanyak melakukan 15 Kampanye yang terverifikasi, kemudian disusul oleh Kota Tanjungpinang dengan 7 Kampanye. Sementara Kabupaten Karimun Tidak memenuhi verifikasi kampanye yang sesuai kriteria.

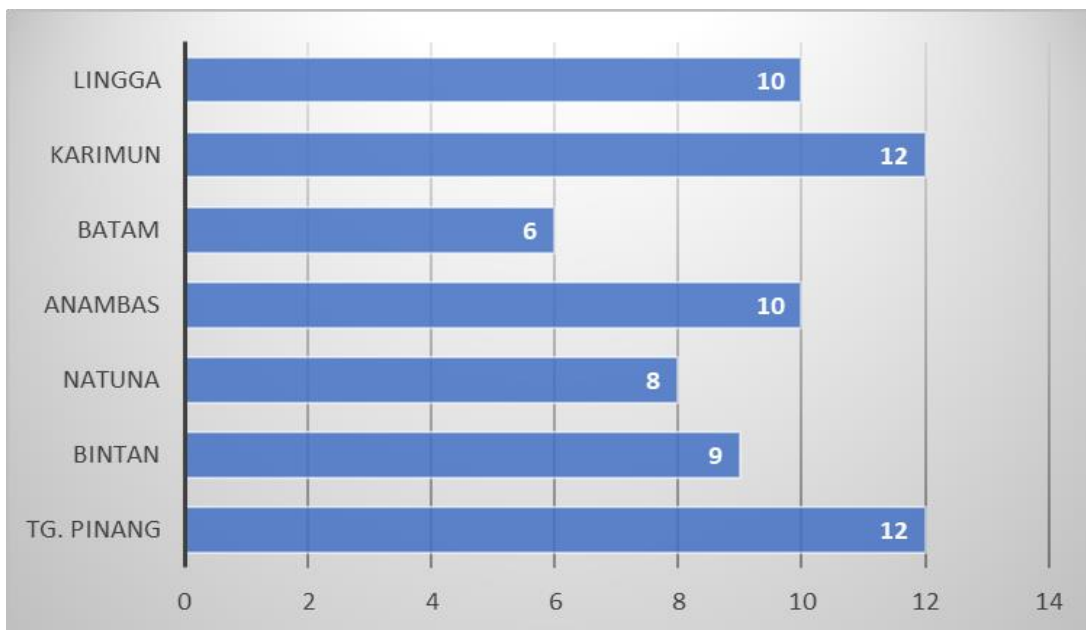
Untuk kriteria kegiatan skrining kesehatan di tempat kerja dilakukan bukan hanya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota namun juga Puskesmas melalui program Kesehatan Kerja. Kegiatan ini dilakukan penginputan melalui aplikasi Komdat Kesmas Kemenkes RI.



Grafik 3.17
 Kegiatan Skrining Kesehatan di Tempat Kerja
 Provinsi Kepulauan Riau 2024 Tahun 2024

Terlihat bahwa skrining Kesehatan di tempat kerja dilaksanakan secara rutin oleh Kab/Kota hampir disetiap bulan. Kabupaten Karimun dan Kota Tanjungpinang terbanyak dengan melakukan 12 kali kegiatan dalam setahun.

Kriteria selanjutnya adalah Kabupaten/Kota melakukan kegiatan pembinaan Kesehatan tradisional. Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :



Grafik 3.18
 Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesehatan Tradisional per Kabupaten/Kota
 Provinsi Kepulauan Tahun 2024

Kegiatan pembinaan Kesehatan tradisional dilaksanakan secara rutin hampir disetiap bulan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan Puskesmas Kabupaten/Kota.

Analisis Penyebab Keberhasilan Indikator ini dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain, dukungan dari pimpinan, Respon cepat dari Kabupaten Kota serta adanya umpan balik yang berjenjang dari tiap tingkatan mulai dari Pusat, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain itu adanya kerjasama antara sektor kesehatan dengan Lintas sektor lainnya yang terkait Germas serta faktor kedisiplinan pelaporan kegiatan sesuai dengan format laporan juga sangat mempengaruhi keberhasilan capaian indikator ini.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas :

- Melakukan Kegiatan Workshop Advokasi Germas Tingkat Provinsi Kepulauan Riau, dengan tujuan untuk melakukan pembinaan, pendampingan serta koordinasi terkait dengan implementasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari di Kota Tanjungpinang dengan narasumber dari Bappenas, Kemendagri, Kemenkes Pusat dan Bappeda Provinsi Kepulauan Riau sebagai *Leading Sector* Germas,
- Melaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Germas di Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk melakukan pembinaan dari OPD teknis cluster Germas meliputi Cluster Peningkatan Prilaku Hidup Sehat, Cluster Lingkungan Sehat, dan Cluster Germas lainnya, dan
- Melaksanakan Kegiatan Penyampaian Informasi Kesehatan Tema Germas Melalui berbagai media seperti Media Elektronik Televisi Lokal, media online dan media sosial.

Kegiatan Workshop Advokasi Gernas Tingkat Provinsi Kepulauan Riau.



Kegiatan Koordinasi dan Pendampingan Implementasi Gernas di Kab/ Kota



1.

Gambar 3.7
Pelaksanaan Gerakan Masyarakat (GERMAS)
Provinsi Kepulauan Riau 2024

2
SASARAN 2
Meningkatnya Pemenuhan Sumber Daya
Manusia Kesehatan Sesuai Standar

Untuk mencapai sasaran 2, diukur melalui pencapaian atas 4 indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.10.
Pengukuran Kinerja Sasaran 2
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 5 (Lima) Tahun (2021-2026)	Tahun 2024			
			Target	Capaian	%	Status Capaian
1.	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	60	56	69,79	124	Sangat Baik
2.	Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib	85	75	80	106	Sangat Baik
3.	Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSJKO Engku Haji Daud	60	40	40	100	Sangat Baik

1. Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

Permasalahan nasional yang menjadi tantangan dalam pengelolaan SDM kesehatan antara lain mencakup jumlah yang belum terpenuhi, distribusi yang tidak merata, dan kualitas tenaga kesehatan yang perlu ditingkatkan. Tenaga kesehatan yang cukup dan merata merupakan *enabler* penting dalam pembangunan program kesehatan. Fasilitas tidak akan bisa dibangun secara merata tanpa tersedianya tenaga Kesehatan.

Merujuk pada Permenkes nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas bahwa ketenagaan di Puskesmas terdiri dari tenaga kesehatan dan non kesehatan. Standar tenaga kesehatan puskesmas adalah 9 jenis tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga dokter, dokter gigi, bidan, perawat, kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, dan analis kesehatan.

Untuk tenaga kesehatan lainnya dapat disediakan disesuaikan dengan fungsi dan pelayanan yang diselenggarakan puskesmas seperti tenaga terapis gigi dan mulut, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, perekam medis dan informasi kesehatan, dan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, untuk tenaga non kesehatan harus mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem Informasi dan kegiatan operasional lain di puskesmas. Standar ketenagaan minimal di Puskesmas berdasarkan Permenkes No. 43 Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.11.
Standar Ketenagaan Minimal di Puskesmas Tahun 2024

NO	Jenis Tenaga	PKM Kawasan Perkotaan		PKM Kawasan Pedesaan		PKM Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil	
		Non Rawat Inap	Rawat Inap	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Non Rawat Inap	Rawat Inap
1	Dokter/Dokter Layanan Primer	1	2	1	2	1	2
2	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
3	Perawat	5	8	5	8	5	8
4	Bidan	4	7	4	7	4	7
5	Tenaga Kesmas	2	2	1	1	1	1
6	Tenaga Kesling	1	1	1	1	1	1
7	ATLM	1	1	1	1	1	1
8	Tenaga Gizi	1	2	1	2	1	2
9	Tenaga Kefarmasian	1	2	1	1	1	1
10	Tenaga Administrasi	3	3	2	2	2	2
11	Pekarya	2	2	1	1	1	1
Total		22	31	19	27	19	27

Sumber: Permenkes No.43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas

Tabel diatas adalah Standar Ketenagaan minimal di Puskesmas agar pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dapat terselenggara secara optimal, belum termasuk tenaga di Puskesmas Pembantu dan Polindes/Praktik Bidan Desa, namun untuk jumlah dan jenis tenaga ideal yang dibutuhkan Puskesmas ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Analisis Beban Kerja.

Gambaran Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan strategis di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12.
Puskesmas yang Memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan Strategis di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Puskesmas Lengkap 9 Jenis Nakes Sesuai Standar	%
1	Karimun	13	10	76,92
2	Batam	21	18	85,71
3	Natuna	15	9	60
4	Anambas	10	3	30

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Puskesmas Lengkap 9 Jenis Nakes Sesuai Standar	%
5	Tg. Pinang	8	5	62,50
6	Lingga	14	10	71,43
7	Bintan	15	12	80
JUMLAH		96	67	69,79

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 96 puskesmas yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, baru sebanyak 67 (69,79%) puskesmas yang memenuhi standar 9 jenis tenaga kesehatan. Target Provinsi untuk tahun 2024 adalah 56%, sementara target Nasional 83%. Secara nasional, target tersebut belum tercapai, akan tetapi secara target provinsi sudah tercapai. Capaian Tahun 2024 ini berbeda dengan tahun 2023. Tahun 2023 capaian 9 jenis tenaga kesehatan strategis di Puskesmas sebesar 55,20% (53 puskesmas dari 96 puskesmas). Selain itu, dari tabel terlihat juga bahwa masih ada 29 (30,21%) puskesmas yang tersebar pada 7 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yang belum memiliki kelengkapan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar.

Beberapa kendala dalam pemenuhan tenaga kesehatan strategis di Puskesmas antara lain oleh adanya pegawai yang pensiun atau pindah, kondisi geografis daerah yang kurang diminati oleh tenaga kesehatan untuk bertugas, adanya keterbatasan anggaran dan regulasi yang melarang rekrutmen tenaga kontrak. Kekurangan tenaga kesehatan strategis ini tidak saja untuk puskesmas terpencil dan sangat terpencil, namun juga pada puskesmas perkotaan dan pedesaan. Dengan diterbitkannya Permenkes No. 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat, harapan akan pemenuhan tenaga kesehatan strategis di puskesmas kiranya dapat terwujud. Dimana dalam Permenkes tersebut tidak menetapkan kriteria puskesmas tertentu sebagai wilayah penempatan tenaga Nusantara Sehat. Dengan kata lain, tenaga Nusantara Sehat berarti dapat ditempatkan di puskesmas perkotaan dan pedesaan juga, bahkan di rumah sakit sesuai dengan kebutuhan dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Tahun 2024, jumlah tenaga kesehatan penugasan khusus melalui Program Nusantara Sehat di Kepulauan Riau sebanyak 61 orang yang tersebar di beberapa Puskesmas di Kabupaten Kota. Keberadaan tenaga kesehatan Nusantara Sehat ini sangat besar pengaruhnya bagi program pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Berikut beberapa dokumentasi Penyerahan Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Program Nusantara Sehat Individual Periode IV Bulan Agustus Tahun 2024 ke Puskesmas Siantan Tengah, Puskesmas Moro, Puskesmas Durai, dan Puskesmas Suak Midai.



Gambar : 3.8

Penyerahan Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Program Nusantara Sehat Individual Tahun 2024

Selain dari Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Program Nusantara Sehat, pemenuhan tenaga kesehatan strategis di puskesmas juga diupayakan melalui Program Internsip Dokter Indonesia. Penyelenggaraan program Internsip ini selain untuk pemahiran dan pemandirian, juga memberi manfaat untuk pemenuhan tenaga medis khususnya pada fasyankes di daerah terpencil dan kekurangan tenaga medis. Provinsi Kepulauan Riau mengambil peran dalam penyelenggaraan PIDI dan PIDGI. Adanya program ini sangat membantu pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau dan dapat mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan dokter terutama di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama puskesmas.

Saat ini Provinsi Kepulauan Riau terdapat 19 wahana yang diisi oleh peserta PIDI dengan pasangan Puskesmasnya dan 1 Wahana yang diisi oleh peserta PIDGI dengan pasangan Puskesmasnya. Total peserta PIDI saat ini seluruhnya berjumlah 227 peserta yang merupakan angkatan I periode Februari tahun 2024, angkatan II periode Mei tahun 2024, angkatan III periode Agustus 2024 serta angkatan IV periode November tahun 2024. Sementara Total peserta PIDGI pada tahun ini seluruhnya berjumlah 17 peserta yang merupakan angkatan I periode Februari dan angkatan IV periode November 2024, yang mana peserta PIDGI angkatan I periode

Februari 2024 sebanyak 8 peserta telah selesai melaksanakan masa Intersipnya pada tanggal 14 Agustus 2024.



Gambar : 3.9

Penyerahan Peserta Program Intersip Dokter Indonesia Tahun 2024

2. Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat > 20 jam/tahun di RSUD Raja Ahmad Tabib

RSUD Raja Ahmad Tabib telah melaksanakan tugas sebagai UPTD yang mempunyai tugas menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran tingkat pencapaian kinerja RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2024 dilakukan dengan cara mengukur indikator pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Indikator Kinerja untuk persentase jumlah karyawan yang mengikuti diklat > 20 jam/tahun diperoleh dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah karyawan yang mengikuti diklat >20 Jam/tahun} \times 100 \%}{\text{Jumlah seluruh karyawan RSUD Raja Ahmad Tabib}}$$

Untuk tahun 2024 jumlah karyawan yang mengikuti diklat \geq 20 jam/tahun adalah 75%. sedangkan capaiannya 80% dengan total 709 orang karyawan yang mengikuti diklat \geq 20 jam/tahun sejak tahun 2024. Pendidikan dan pelatihan karyawan masuk kategori *In House Training* maupun *Eksternal Training*.

Capaian tersebut mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 63,81%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.13.

Capaian persentase jumlah karyawan yang mengikuti diklat > 20 jam/tahun di RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2023-2024

No	Indikator	Capaian 2023	Capaian 2024
1	Persentase jumlah karyawan yang mengikuti diklat > 20 jam/tahun RSUD Raja Ahmad Tabib	63,81%	80%

Beberapa pelaksanaan diklat pada tahun 2024 antara lain *In House Training* (Bantuan Hidup Dasar, Komunikasi Efektif, Dasar-Dasar K3RS dan Alat Proteksi Kebakaran, Bimbingan Teknis Penyusunan Amdal dan Workshop Paliatif Merawat Pasien Kanker di Rumah Bagi Tenaga Kesehatan) dan *Eksternal Training* (Pelatihan ACLS dan Pelatihan Code Stroke Bagi Tim Stroke di Rumah Sakit).

3. Persentase Jumlah Karyawan yang mengikuti diklat > 20 jam /tahun di RSJKO Engku Haji Daud

Pengukuran tingkat pencapaian kinerja RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2024 dilakukan dengan cara mengukur indikator Indikator Kinerja untuk persentase jumlah karyawan yang mengikuti diklat > 20 jam/tahun diperoleh dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah karyawan yang mengikuti diklat >20 Jam/tahun} \times 100 \%}{\text{Jumlah seluruh karyawan RSJKO Engku Haji Daud}}$$

Untuk tahun 2024 jumlah karyawan yang mengikuti diklat \geq 20 jam/tahun RSJKO Engku Haji Daud dengan realisasi capaian sebesar 40% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Untuk tahun 2024 jumlah karyawan yang mengikuti diklat > 20 jam/tahun berjumlah 167 orang. Pendidikan dan pelatihan karyawan masuk kategori *In House Training* maupun *Eksternal Training*. Capaian tersebut sama

dengan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 40% dengan kategori capaian kinerja "sangat baik". Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.14.
Capaian Persentase Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat > 20 jam/tahun di RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2024

No	Indikator	Capaian 2023	Capaian 2024
1	Persentase jumlah karyawan yang mengikuti diklat > 20 jam/tahun RSJKO Engku Haji Daud	40%	40%

Adapun pelaksanaan diklat pada tahun 2024 yaitu *In House Training* dan *Eksternal Training* seperti Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Workshop.



Sasaran 3 diukur melalui pencapaian atas 4 indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.15.
Pengukuran Kinerja Sasaran 3
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 5 (Lima) Tahun (2021-2026)	Tahun 2024			
			Target	Capaian	%	Status Capaian
1.	Persentase Puskesmas Terakreditasi	98	97	98	101	Sangat Baik
2.	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	100	95	100	105	Sangat Baik
3.	Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100	Sangat Baik

No	Indikator Kinerja	Target 5 (Lima) Tahun (2021-2026)	Tahun 2024			
			Target	Capaian	%	Status Capaian
	Tabib					
4.	Status Akreditasi RSJKO Engku Haji Daud	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.16, diketahui bahwa sasaran 3 yaitu meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan yang harus dicapai melalui 4 indikator sasaran telah mampu dicapai seluruhnya dengan kategori “sangat baik”.

1. Persentase Puskesmas Terakreditasi

Akreditasi puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Salah satu syarat utama puskesmas yang akan diakreditasi adalah puskesmas tersebut harus sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan dengan diterbitkannya nomor registrasi puskesmas.

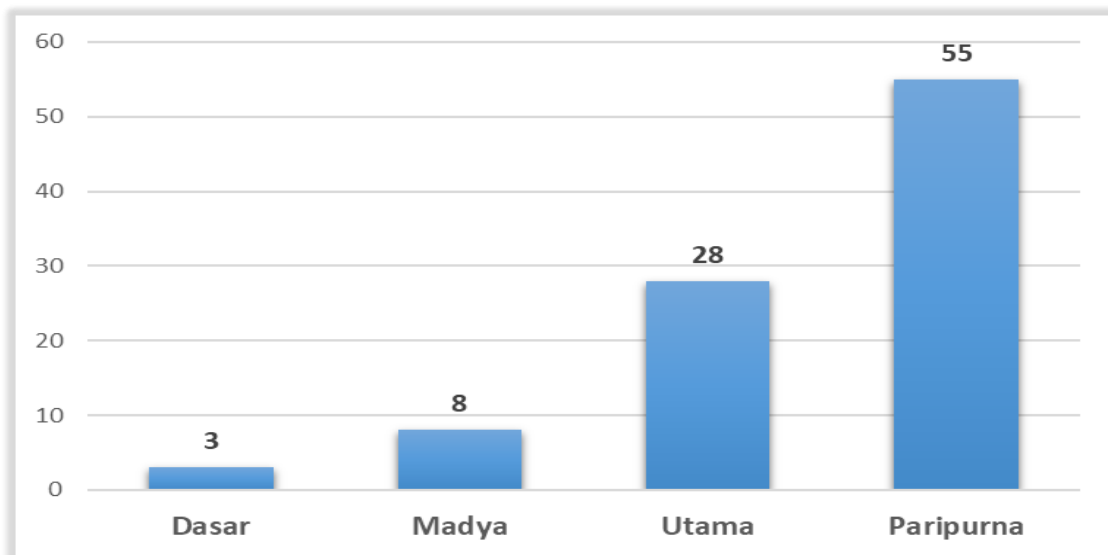
Tabel 3.16.
Jumlah, Registrasi dan Akreditasi Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas			Registrasi Puskesmas			Akreditasi			%
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	Karimun	13	13	13	13	13	13	0	10	3	100
2	Bintan	15	15	15	15	15	15	0	8	7	100
3	Natuna	14	15	15	14	15	15	0	6	9	100
4	Lingga	13	14	14	13	14	14	0	13	0	93
5	Batam	21	21	21	21	21	21	0	21	0	100

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas			Registrasi Puskesmas			Akreditasi			%
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
6	Tanjungpinang	7	7	8	7	7	8	0	7	0	88
7	Kep. Anambas	10	10	10	10	10	10	0	7	3	100
	Total	93	95	96	93	95	96	0	72	22	98

Dari tabel diatas tergambar bahwa pada tahun 2024 jumlah Puskesmas yang teregistrasi dan telah terakreditasi sebanyak 94 puskesmas dari total 96 puskesmas.

Dari 94 puskesmas yang sudah terakreditasi, jika dilihat sebarannya berdasarkan status akreditasi yaitu didominasi oleh status kelulusan Paripurna sebanyak 55 puskesmas (57,29%), diikuti status utama sebanyak 28 Puskesmas (29,17%), status Madya sebanyak 8 Puskesmas (8,33%) dan status Dasar sebanyak 3 Puskesmas (3,13%). Untuk puskesmas dengan status akreditasi dasar terdapat di Kabupaten Anambas yaitu Puskesmas Kute Siantan, Jemaja Barat dan Siantan Utara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Grafik 3.19
Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Dalam pelaksanaan akreditasi yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota, berikut di dokumentasikan beberapa foto pelaksanaan survei akreditasi seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.10 Pelaksanaan Survei Akreditasi di Kabupaten/Kota Tahun Provinsi Kepulauan Riau 2024

2. Persentase Rumah Sakit Terakreditasi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomo 12 tahun 2020 tentang akreditasi rumah sakit. Akreditasi bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan rumah sakit melindungi keselamatan pasien, meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia di rumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi, mendukung program pemerintah di bidang kesehatan dan meningkatkan profesionalisme rumah sakit. Dari 36 rumah sakit yang sudah terakreditasi, jika dilihat sebarannya berdasarkan status akreditasi yaitu didominasi oleh status kelulusan Paripurna sebanyak 31 rumah sakit (86,1%) dan diikuti status utama sebanyak 5 rumah sakit (13,9%).

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Sakit	Rumah Sakit Terakreditasi	Status Akreditasi		
				Madya	Utama	Paripurna
1	Karimun	3	3	-	-	3
2	Bintan	2	2	-	-	2
3	Natuna	2	2	-	1	1
4	Lingga	2	2	-	-	2
5	Anambas	3	3	-	2	1
6	Batam	21	21	-	2	19
7	Tanjung pinang	3	3	-	-	3
	TOTAL	36	36	-	5	31

Tabel 3.17. Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Pada tahun 2023 rumah sakit di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 37 rumah sakit, terdapat 2 rumah sakit yang belum akreditasi, yaitu RSUD Tanjungbatu Kundur Kabupaten Karimun dan RSAU dr. Yuniati Wisma Karyani di Kabupaten Natuna. Tahun 2024 terdapat 1 penghapusan rumah sakit yaitu RSIA Mutiara Aini di Kota Batam, sehingga jumlah rumah sakit menjadi 36 dan seluruhnya telah terakreditasi.



Gambar 3.11

Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Batu dengan Akreditasi Paripurna

3. Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib

RSUD Raja Ahmad Tabib sebagai RS rujukan regional provinsi yang merupakan pusat rujukan utama dari kabupaten/kota se-provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas didukung dengan pelayanan yang modern dari sisi sarana prasarana, prosedur pelayanan, ketersediaan tenaga.

Salah satunya adalah melalui akreditasi yang mencerminkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah terstandarisasi dan terorientasi pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan jaminan, kepuasan serta perlindungan kepada masyarakat atas pemberian pelayanan kesehatan.

Pencapaian akreditasi di RSUD Raja Ahmad Tabib merupakan salah satu indikator kinerja sasaran Gubernur Provinsi Kepulauan Riau 5 tahun (2021-2026). Bahwa berdasarkan Sertifikat yang diperoleh dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit

Nomor **KARS-SERT/286/XI/2022 tanggal 03 November 2022**, RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau berhasil memenuhi Standar Akreditasi tingkat PARIPURNA dengan masa berlaku sampai dengan 24 Oktober 2026.

Sebagai bentuk peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit maka diwajibkan untuk melaksanakan akreditasi ulang dalam jangka waktu setiap 4 tahun sekali dan melaksanakan survei akreditasi verifikasi setiap tahunnya.

4. Status Akreditasi RSJKO Engku Haji Daud

RSJKO Engku Haji Daud merupakan rumah sakit yang ditunjuk untuk menjadi Rumah Sakit Khusus Jiwa di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 2021.

Pencapaian akreditasi RS di RSJKO Engku Haji Daud merupakan salah satu indikator kinerja sasaran Gubernur 5 tahun (2021-2026). Bahwa berdasarkan Sertifikat yang diperoleh dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor **00499/K/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023**, RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau berhasil memenuhi Standar Akreditasi tingkat PARIPURNA dengan masa berlaku sampai dengan 20 Desember 2027 .

Sebagai bentuk peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit maka diwajibkan untuk melaksanakan akreditasi ulang dalam jangka waktu setiap 4 tahun sekali dan melaksanakan survei akreditasi verifikasi setiap tahunnya.



Untuk mencapai sasaran 4, diukur melalui pencapaian atas indikator kinerja berikut :

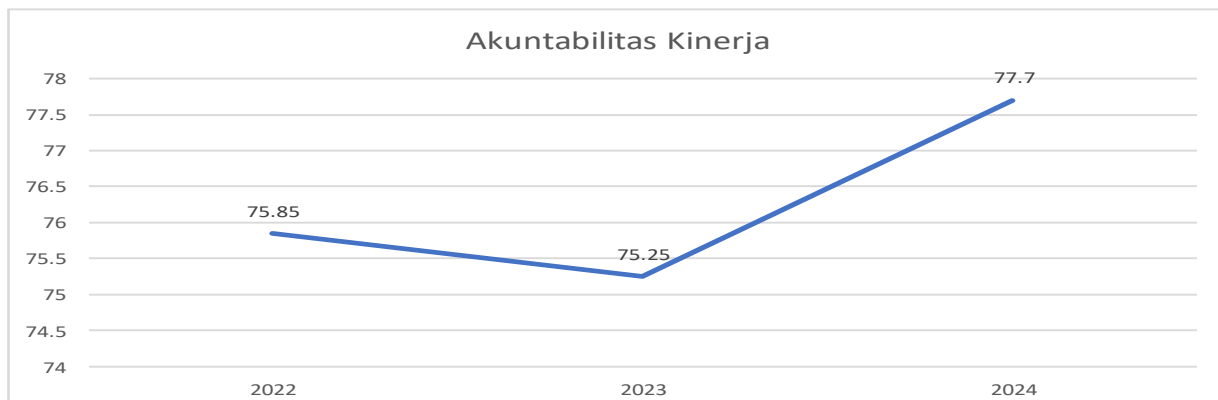
Tabel 3.18.
Pengukuran Kinerja Sasaran 4
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 5 (Lima) Tahun (2021-2026)	Tahun 2024			
			Target	Capaian	%	Status Capaian
1.	Akuntabilitas Kinerja	80	77	77.7	101	Sangat Baik

Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Dalam kaitannya dengan kebijakan reformasi birokrasi saat ini, peningkatan kapasitas dan kualitas tata Kelola pemerintahan menjadi suatu hal penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik, akuntabel dan transparan. Upaya meningkatkan hal tersebut maka akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terus menerus dilakukan, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Berdasarkan Tabel 3.18. diatas, diketahui bahwa sasaran 4 yaitu Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahann yang harus dicapai melalui 1 indikator sasaran yaitu akuntabilitas kinerja telah mampu dicapai dengan kategori “sangat baik”.

Berikut dibawah ini penjelasan grafik Trend Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 – 2024.



Grafik 3.20
Trend Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2024

Trend Hasil evaluasi capaian atas implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2022 – 2024 menunjukkan kategori peringkat “BB” (Sangat Baik).

Evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat provinsi kepulauan Riau meliputi terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yaitu: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, yang selanjutnya diberikan "Kategori Peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan.

3.2. Akuntabilitas Kinerja RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau

Sasaran RSUD Raja Ahmad Tabib dicapai melalui realisasi atas 4 (empat) indikator yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.19.
Pengukuran Kinerja Sasaran
RSUD Provinsi Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

NO.		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terselenggaranya pelayanan kesehatan rumah sakit yang bermutu dan memenuhi standar akreditasi dan pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	91.14%	114%
		Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	Paripurna	Paripurna	100
		Rumah Sakit Pendidikan	Utama	Utama	100%
		Persentase Jumlah Karyawan yg mengikuti diklat > 20 Jam/tahun	75%	80%	106%

Capaian sasaran strategis RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2024 yaitu terselenggaranya pelayanan kesehatan rumah sakit yang bermutu dan memenuhi standar akreditasi dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya. Untuk realisasi indikator kinerja Rumah Sakit Pendidikan tercapai dengan realisasi tingkat “**UTAMA**”.

Hal ini melebihi dari target renstra 2021-2026. Indikator persentase jumlah karyawan yang mengikuti diklat >20 Jam/tahun sudah tercapai.

RSUD Raja Ahmad Tabib melakukan survei kepuasan masyarakat tahun 2024 melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan di RSUD Raja Ahmad Tabib bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya bagi masyarakat serta memberi gambaran tentang kinerja pelayanan. Dibawah ini adalah tabel hasil survei terhadap unsur pelayanan di RSUD Raja Ahmad Tabib.

Tabel 3.20.
Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2024

No	Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM
1	Semester I	83.02%
2	Semester II	91.14 %

Berdasarkan tabel diatas Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II mengalami peningkatan dibanding semester I. Jika dirata-ratakan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 87.08%. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,57% dibanding dengan tahun 2023 (85,51%). Untuk rincian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat per Sub Unit Pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.21.
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Sub Unit Pelayanan Semester I dan II RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2024

Nomor	Unit pelayanan Publik	Semester I (%)	Semester II (%)	Rata-Rata
1	Rawat Jalan	83.27	90.27	86.77
2	Rawat Inap	84.75	94.20	89.475
3	Instalasi Gawat Darurat	81.32	93.44	87.38

Sumber : Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2024

Dari hasil survei IKM berdasarkan sub unit pelayanan nilai indeks

terendah pada Rawat Jalan dengan nilai 86.77% dan tertinggi pada Instalasi Rawat Inap dengan 89.475%.

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan menghadapi era globalisasi maka akreditasi diperlukan sebagai bentuk pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada manajemen rumah sakit, karena telah memenuhi standar yang ditetapkan. RSUD Raja Ahmad Tabib sebagai RS rujukan provinsi, sangat berkepentingan dengan tercapainya status akreditasi untuk menepis keraguan masyarakat, meningkatkan kepercayaan dan memberikan pelayanan bermutu yang berorientasi pada keselamatan pasien.

Pencapaian akreditasi RS di RSUD Raja Ahmad Tabib merupakan salah satu indikator kinerja sasaran Gubernur 5 tahun (2021-2026). Bahwa berdasarkan Sertifikat yang diperoleh dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor KARS-SERT/286/XI/2022 tanggal 03 November 2022, RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau berhasil memenuhi Standar Akreditasi tingkat PARIPURNA dengan masa berlaku sampai dengan 24 Oktober 2026.



Gambar 3.12.

Sertifikat Akreditasi KARS RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau

Sebagai bentuk peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit maka diwajibkan untuk melaksanakan akreditasi ulang dalam jangka waktu setiap 4 tahun sekali dan melaksanakan survei akreditasi verifikasi setiap tahunnya. Tahun 2023 RSUD Raja Ahmad Tabib menargetkan RS Pendidikan jenjang Satelit, namun karena

pertimbangan tertentu RSUD Raja Ahmad Tabib mengajukan RS Pendidikan UTAMA ke Kemenkes. Sesuai hasil Visitasi dari Kemenkes melalui offline dan online dan diumumkan pada tanggal 08 Februari 2023 berhasil ditetapkan sebagai RS Pendidikan UTAMA.

Berdasarkan hasil visitasi tersebut diatas, maka capaian Indikator kinerja RSUD Raja Ahmad Tabib terkait RS Pendidikan dapat melebihi target renstra tahun 2022 yakni sebesar 300%.

Sedangkan Indikator Kinerja untuk persentase jumlah karyawan yang mengikuti diklat > 20 jam/tahun diperoleh dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah karyawan yang mengikuti diklat >20 Jam/tahun}}{\text{Jumlah seluruh karyawan RSUD Raja Ahmad Tabib}} \times 100 \%$$

Untuk tahun 2024 jumlah karyawan yang mengikuti diklat > 20 jam/tahun berjumlah 709 orang dengan persentase sebesar 80%. Pendidikan dan pelatihan karyawan masuk kategori *In House Training* maupun *Eksternal Training*.

3.3. Akuntabilitas Kinerja RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau

Sasaran RSJKO Engku Haji Daud dicapai melalui realisasi atas 2 (dua) indikator yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.22.
Pengukuran Kinerja Sasaran
RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2024

NO.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Status Akreditasi RSJKO Engku Haji Daud	Paripurna	Paripurna	100
2	Persentase Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat lebih dari 20 jam/ tahun pada RSJKO Engku Haji Daud	40%	40%	100

Berdasarkan tabel 3.22 dapat dilihat bahwa capaian indikator Kinerja RSJKO Engku Haji Daud sudah melebihi target yaitu Akreditasi Rumah Sakit dengan penilaian KARS mencapai bintang 5 (Paripurna) dalam kategori “sangat baik”.

Sedangkan persentase jumlah pegawai yang mengikuti diklat lebih dari 20 jam/ tahun pada RSJKO Engku Haji Daud sudah tercapai dengan capaian kinerja 100%. Sepanjang tahun 2024 terdapat 40 % atau 167 orang pegawai telah diikutkan

pendidikan dan pelatihan (diklat) di atas 20 jam guna untuk peningkatan SDM kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



Gambar 3.13. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Engku Haji Daud Provinsi Kepri di Tanjunguban, Meraih Predikat Paripurna dari Komisi Akreditasi di Jakarta

3.4 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024

Realisasi belanja APBD (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebesar Rp.77.808.391.081,00 (95,46%) dari jumlah anggaran sebesar Rp.81.505.120.246,00 bila dibandingkan dengan realisasi keuangan tahun 2023 (97,61%), maka serapan keuangan tahun 2024 mengalami penurunan dan hal ini dikarenakan adanya tunda bayar sebesar Rp. 2.334.343.029,00.

Tabel 3.23. Laporan Kinerja Keuangan APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

PROGRAM	ANGGARAN APBD-P 2023	REALISASI KEUANGAN	SISA
BELANJA OPERASIONAL	Rp. 75,401,862,721,00	Rp. 72,066,686,315,00	Rp. 3,335,176,406,00
a. Belanja Pegawai	Rp. 20,719,056,876,00	Rp. 20,407,161,637,00	Rp. 311,895,239,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 53,005,981,845,00	Rp. 50,959,524,678,00	Rp. 2,046,457,167,00
c. Belanja Hibah	Rp. 1.676,824,000,00	Rp. 700,000,000,00	Rp. 976,824,000,00
BELANJA MODAL	Rp 6,103,257,525,00	Rp. 5,741,704,766,00	Rp. 361,552,759,00

PROGRAM	ANGGARAN APBD-P 2023	REALISASI KEUANGAN	SISA
a. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 5.555,358,140,00	Rp. 5.438,816,628,00	Rp. 116,541,512,00
Total ANGGARAN	Rp. 81,505,120,246,00	Rp 77,808,391,081,00	Rp. 3,696,729,165,00

Beberapa permasalahan menurunnya capaian realisasi keuangan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut :

1. Perbedaan antara proyeksi pendapatan yang tercantum dalam dokumen RPJMD dengan realisasi pendapatan daerah setiap tahun mengakibatkan inkonsistensi dalam penetapan pagu anggaran perangkat daerah, yang dapat berdampak pada stabilitas perencanaan dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
2. Adanya perbedaan harga pasar untuk jenis barang tertentu yang berbeda dengan harga saat perencanaan tahun sebelumnya akibat adanya inflasi maupun keterbatasan bahan baku, sehingga menyebabkan harga pasar lebih tinggi dari standar satuan harga yang tersedia pada sistem. Perubahan standar harga satuan dan penyesuaian dokumen anggaran dimaksud tidak fleksibel dan harus dilakukan dalam proses yang tidak singkat.
3. Adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat atas kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah di tengah tahun anggaran menyebabkan perlu dilakukan refocusing anggaran secara cepat dan berdampak pada pelaksanaan program yang telah disusun sebelumnya.
4. Masih terdapat beberapa perbedaan interpretasi aturan oleh auditor yang berdampak pada ketidakpastian dalam implementasi program/kegiatan.
5. Proses administrasi dan verifikasi dalam transfer pusat serta pencairan anggaran DAK/DAU yang memerlukan waktu dan melalui berbagai tahapan yang kompleks, berpotensi menyebabkan penumpukan pelaksanaan kegiatan pada periode tertentu, sehingga berdampak pada efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran.
6. Terdapat beberapa subkegiatan mengalami tunda bayar sehingga mempengaruhi capaian realisasi keuangan.
7. Keterlambatan salur tahap I yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan bersumber dana BOK.

BAB 4 PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta penerapan dari tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Kesehatan sebagai pelayanan publik.

Dengan parameter indikator kinerja dan target yang telah ditentukan di rencana strategis tahun 2024 maka secara umum pencapaian indikator pada program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tercapai dengan baik, di samping ada beberapa kegiatan yang belum mencapai target indikator. Kegiatan yang diprioritaskan dijabarkan dalam bentuk 4 Sasaran Strategis dan 17 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Sangat disadari bahwa laporan kinerja ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sepanjang tahun 2024.



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **MOH. BISRI, S.K.M., M.Kes.**

Jabatan : **Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**

Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**MOH. BISRI, S.K.M., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 197101009 199501 1 001**

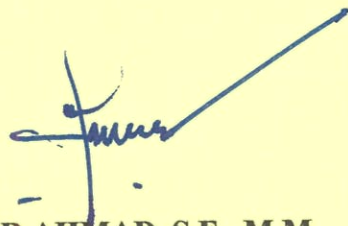
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	123
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	12
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14%
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	92%
		Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	72%
		Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas \geq 80% Puskesmas	71%
		Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	94,60%
		Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	91%
		Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	86%
2.	Meningkatnya pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	56%
		Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat $>$ 20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib	75%
		Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat $>$ 20Jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud	40%
3.	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Persentase Puskesmas terakreditasi	97%
		Persentase Rumah Sakit terakreditasi	95%
		Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Paripurna
		Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud	Paripurna
4.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 45,785,777,208,-	APBD
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 12,172,970,679,-	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 856,072,800,-	APBD
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp. 31,603,200,-	APBD
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 24,175,788,281,-	APBD


Tanjungpinang, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU



H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



MOH. BISRI, S.K.M., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 197101009 199501 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Dr. Moh. Bisri, S.K.M., M.Kes.**

Jabatan : **Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Hj. Marlin Agustina, S.H.**

Jabatan : **Plt. Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Plt. Gubernur Kepulauan Riau


Hj. Marlin Agustina, S.H.

Pihak Pertama,

**Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau**


**Dr. Moh. Bisri, S.K.M., M.Kes.
Pembina Utama Muda (IV/d)
NIP 1971010091995011001**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	123
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	12
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14%
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	92%
		Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	72%
		Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas \geq 80% Puskesmas	71%
		Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	94,60%
		Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	95%
		Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	86%
2.	Meningkatnya pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	56%
		Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat $>$ 20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib	75%
		Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat $>$ 20Jam/Tahun pada RSKJKO Engku Haji Daud	40%
3.	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Persentase Puskesmas terakreditasi	97%
		Persentase Rumah Sakit terakreditasi	95%
		Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Paripurna
		Status Akreditasi RSKJKO Engku Haji Daud	Paripurna
4.	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Akuntabilitas Kinerja	77%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 44.437.498.341,-	P APBD
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 10.237.113.827,-	P APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 689.129.700,-	P APBD
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp. 71.603.200,-	P APBD
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 26.069.775.178,-	P APBD

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Plt. Gubernur Kepulauan Riau


Hj. Marlin Agustina, S.H.

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau




Dr. Moh. Bisri, S.K.M., M.Kes.
Pembina Utama Muda (IV/d)
NIP 1971010091995011001

Laporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase Capaian	Kategori Capaian	Rumus	Pembilang / Penyebut
1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	123	93	124	Sangat Baik	Jumlah kematian ibu berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas pada tahun tertentu (dibagi) Jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama (dikali) 1.000 Kelahiran Hidup	$(32/34447) * 100000$
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	12	7,4	138	Sangat Baik	Jumlah bayi yang meninggal sebelum usia 1 tahun / jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama (dikali) 100.000 Kelahiran Hidup	$(255/34447) * 1000$
3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14	16,8	80	Baik	(Jumlah balita dengan TB per umur < 2 SD : Jumlah balita) (dikali) 100% (Data SKI 2023)	*16.8
4	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	92	81	88	Baik	Jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap (dikali) semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan (dikali) 100%	Data Bersumber dari Aplikasi SITB
5	Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	72	96	133	Sangat Baik	Jumlah ODHA yang mengakses ARV (dikali) Jumlah ODHA yang memenuhi syarat pengobatan (dikali) 100%	$(1011 / 1050) * 100$
6	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	71	100	141	Sangat Baik	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas (dikali) Jumlah Seluruh Kab/Kota (dikali) 100%	$7 / 7 * 100$
7	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	94,60	89,26	94	Baik	Jumlah bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap (dikali) jumlah balita usia 0-11 bulan (dikali) 100%	$(32294 / 36180) * 100$
8	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	95	97,6	103	Sangat Baik	Jumlah penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional(JKN)/KIS (dikali) jumlah penduduk keseluruhan (dikali) 100%	$(2166857 / 2220043) * 100$
9	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	86	100	116	Sangat Baik	Jumlah Kabupaten Kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (dikali) jumlah Kab/Kota (dikali) 100%	$(7 / 7) * 100$
10	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	56	69,79	125	Sangat Baik	Jumlah puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (dikali) Jumlah Puskesmas (dikali) 100%	$(67 / 96) * 100$
11	Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib	75	80	107	Sangat Baik	Jumlah karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun (dikali) Jumlah seluruh karyawan di rumah sakit (dikali) 100%	$(709 / 886) * 100$
12	Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSKJKO Engku Haji Daud	40	40	100	Sangat Baik	Jumlah karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun (dikali) Jumlah seluruh karyawan di rumah sakit (dikali) 100%	$(167 / 417) * 100$

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase Capaian	Kategori Capaian	Rumus	Pembilang / Penyebut
13	Persentase Puskesmas terakreditasi	97	98	101	Sangat Baik	Jumlah Puskesmas Terakreditasi (dibagi) Jumlah Seluruh Puskesmas yang Terregister (dikali) 100%	(94 / 96) *100
14	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	95	100	105	Sangat Baik	Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi (dibagi) Jumlah Seluruh Rumah Sakit (dikali) 100%	(36 / 36) *100
15	Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Paripurna	Paripurna	100	Sangat Baik	Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Paripurna
16	Status Akreditasi RSJKO Engku Haji Daud	Paripurna	Paripurna	100	Sangat Baik	Status Akreditasi RSJKO Engku Haji Daud	Paripurna
17	Akuntabilitas Kinerja	77	77,7	101	Sangat Baik	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	77,7

Tanjungpinang, 31 Desember 2024



KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

D. MOH. BISRI, SKM, M.Kes
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710109 199501 1 001

**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERIODE 31 DESEMBER 2024**

NO	URAIAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU APBD-P	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	Sisa Pagu	KETERANGAN
					Rp.	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	25	24.175.788.281,00	26.069.775.178	25.569.795.061	98,08	98,25	499.980.117	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	3	222.481.430,00	242.195.682	241.997.300	99,92	100,00	198.382	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10.240.000,00	369.000	369.000	100,00	100,00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		126.224.930,00	141.527.930	141.370.400	99,89	100,00	157.530	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		86.016.500,00	100.298.752	100.257.900	99,96	100,00	40.852	
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	3	18.780.774.718,00	20.696.616.667	20.394.591.337	98,54	100,00	302.025.330	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		18.035.634.091,00	19.846.832.876	19.546.137.637	98,48	100,00	300.695.239	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		727.183.236,00	832.312.500	832.224.000	99,99	100,00	88.500	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		17.957.391,00	17.471.291	16.229.700	92,89	100,00	1.241.591	
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	1	48.372.800,00	48.120.900	46.332.950	96,28	100,00	1.787.950	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		48.372.800,00	48.120.900	46.332.950	96,28	100,00	1.787.950	
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	1	30.000.000,00	7.914.000	7.459.500	94,26	100,00	454.500	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		30.000.000,00	7.914.000	7.459.500	94,26	100,00	454.500	
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	8	747.551.179,00	958.931.329	926.259.357	96,59	88,46	32.671.972	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6.914.719,00	23.116.719	21.103.900	91,29	100,00	2.012.819	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		130.000.000,00	107.423.800	107.423.800	100,00	100,00	-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		5.000.000,00	2.962.400	850.000	28,69	37,50	2.112.400	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		75.796.160,00	67.917.160	65.171.910	95,96	100,00	2.745.250	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		35.000.000,00	33.560.000	24.049.854	71,66	78,40	9.510.146	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		24.000.000,00	19.000.000	17.097.000	89,98	96,00	1.903.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		43.500.000,00	51.000.000	44.894.650	88,03	95,77	6.105.350	

NO	URAIAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU APBD-P	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	Sisa Pagu	KETERANGAN
					Rp.	%	%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		427.340.300,00	653.951.250	645.668.243	98,73	100,00	8.283.007	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	464.211.025,00	279.733.000	278.333.000	99,50	100,00	1.400.000	
	Pengadaan Mebel		179.440.825,00	23.100.000	23.000.000	99,57	100,00	100.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		249.770.200,00	221.633.000	220.333.000	99,41	100,00	1.300.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		35.000.000,00	35.000.000	35.000.000	100,00	100,00	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	3.266.931.189,00	3.174.652.522	3.021.064.129	95,16	97,55	153.588.393	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		290.000.000,00	132.014.233	110.996.008	84,08	92,65	21.018.225	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		64.863.800,00	79.177.300	77.646.196	98,07	100,00	1.531.104	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2.912.067.389,00	2.963.460.989	2.832.421.925	95,58	100,00	131.039.064	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	615.465.940,00	661.611.078	653.757.488	98,81	100,00	7.853.590	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		348.000.000,00	398.600.000	390.992.350	98,09	100,00	7.607.650	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		19.465.940,00	15.465.940	15.220.000	98,41	100,00	245.940	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		248.000.000,00	247.545.138	247.545.138	100,00	100,00	-	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	22	45.785.777.208,00	44.437.498.341	41.258.918.621	92,85	97,37	3.178.579.720	
	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</i>	5	11.227.584.600,00	11.884.692.377	9.716.394.585	81,76	90,37	2.168.297.792	
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3.250.020.000,00	2.974.529.835	2.253.991.827	75,78	83,00	720.538.008	Terdapat tunda bayar sebesar Rp503.280.416
	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)		534.300.200,00	534.300.200	414.525.689	77,58	85,00	119.774.511	

NO	URAIAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU APBD-P	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	Sisa Pagu	KETERANGAN
					Rp.	%	%		
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		4.100.000.000,00	5.076.824.000	4.099.950.000	80,76	88,83	976.874.000	Terdapat tunda bayar sebesar Rp975.821.560
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		647.768.000,00	647.768.000	628.573.400	97,04	100,00	19.194.600	Terdapat tunda bayar sebesar Rp18.379.500
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		2.695.496.400,00	2.651.270.342	2.319.353.669	87,48	95,00	331.916.673	Terdapat tunda bayar sebesar Rp157.950.303
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	15	34.129.889.108,00	32.199.372.464	31.199.683.366	96,90	99,12	999.689.098	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		45.074.000,00	45.074.000	44.314.500	98,31	100,00	759.500	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		45.000.000,00	45.000.000	44.451.500	98,78	100,00	548.500	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		1.143.861.400,00	1.111.388.800	1.087.053.650	97,81	100,00	24.335.150	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif		76.599.500,00	54.931.500	54.901.800	99,95	100,00	29.700	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		1.321.483.300,00	934.646.050	925.104.450	98,98	100,00	9.541.600	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		90.101.600,00	63.101.600	62.755.500	99,45	100,00	346.100	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		1.525.927.261,00	1.831.329.861	1.463.111.100	79,89	86,80	368.218.761	Terdapat tunda bayar sebesar Rp361.731.250
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		99.470.400,00	167.995.400	165.922.000	98,77	100,00	2.073.400	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1.071.435.500,00	1.041.634.106	1.036.000.656	99,46	100,00	5.633.450	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		48.000.000,00	46.855.400	46.855.400	100,00	100,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		150.000.000,00	147.167.000	147.167.000	100,00	100,00	-	

NO	URAIAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU APBD-P	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	Sisa Pagu	KETERANGAN
					Rp.	%	%		
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		27.229.199.147,00	25.427.534.547	24.847.026.053	97,72	100,00	580.508.494	Terdapat tunda bayar sebesar Rp317.180.000
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		579.737.000,00	579.737.000	572.046.600	98,67	100,00	7.690.400	
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		554.000.000,00	554.000.000	553.995.957	100,00	100,00	4.043	
	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota		150.000.000,00	148.977.200	148.977.200	100,00	100,00	-	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1	383.229.500,00	308.359.500	298.553.470	96,82	100,00	9.806.030	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		383.229.500,00	308.359.500	298.553.470	96,82	100,00	9.806.030	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1	45.074.000,00	45.074.000	44.287.200	98,25	100,00	786.800	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		45.074.000,00	45.074.000	44.287.200	98,25	100,00	786.800	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4	12.172.970.679,00	10.237.113.827	10.219.702.669	99,83	100,00	17.411.158	
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	2	12.026.409.504,00	10.096.730.252	10.080.442.469	99,84	100,00	16.287.783	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		11.975.401.504,00	10.043.079.652	10.027.213.869	99,84	100,00	15.865.783	
	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		51.008.000,00	53.650.600	53.228.600	99,21	100,00	422.000	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	2	146.561.175,00	140.383.575	139.260.200	99,20	100,00	1.123.375	
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		113.236.800,00	107.059.200	106.242.800	99,24	100,00	816.400	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		33.324.375,00	33.324.375	33.017.400	99,08	100,00	306.975	
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1	31.603.200,00	71.603.200	71.446.730	99,78	100,00	156.470	
	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	1	31.603.200,00	71.603.200	71.446.730	99,78	100,00	156.470	

NO	URAIAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU APBD-P	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	Sisa Pagu	KETERANGAN
					Rp.	%	%		
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK		31.603.200,00	71.603.200	71.446.730	99,78	100,00	156.470	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1	856.072.800,00	689.129.700	688.528.000	99,91	100,00	601.700	
	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</i>	1	856.072.800,00	689.129.700	688.528.000	99,91	100,00	601.700	
	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		856.072.800,00	689.129.700	688.528.000	99,91	100,00	601.700	
TOTAL		53	83.022.212.168,00	81.505.120.246	77.808.391.081	95,46	99,12	3.696.729.165	



Fanjungpinang, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Moh. Bisri, SKM, M.Kes
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197101091995011001



LAPORAN REALISASI APBD RSUD RAJA AHMAD TABIB
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2024



Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	235.045.373.010	233.230.226.401	19.466.987.472	18.606.362.212	0	0	0	0
1.02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	235.045.373.010	233.230.226.401	19.466.987.472	18.606.362.212	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001			Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	235.045.373.010	233.230.226.401	19.466.987.472	18.606.362.212	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	227.878.396.136	226.740.287.627,00	8.492.592.363	8.139.891.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.005.277	61.317.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.005.277	61.317.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.005.277	61.317.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.01.0001	5.1.02.01	Belanja Barang	33.575.425	29.728.558,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.01.0001	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.575.425	29.728.558,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.01.0001	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.065.578	5.064.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.01.0001	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	21.959.847	20.233.758,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.01.0001	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.550.000	4.430.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.01.0001	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	66.429.852	31.589.302,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.01.0001	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66.429.852	31.589.302,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.01.0001	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66.429.852	31.589.302,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	83.130.849.909	82.222.546.927,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	82.173.893.493	81.275.942.821,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	82.173.893.493	81.275.942.821,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	24.695.877.280	24.460.343.429,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	17.583.705.494	17.499.280.736,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	15.574.125.000	15.498.861.236,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.009.580.494	2.000.419.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.460.508.769	1.438.424.868,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.330.485.081	1.313.374.288,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	130.023.687	125.050.580,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	189.525.000	172.610.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	189.525.000	172.610.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	2.251.571.931	2.219.373.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.064.731.991	2.035.483.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	186.839.940	183.890.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	84.129.991	65.535.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	84.129.991	65.535.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	990.683.890	964.851.660,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	879.870.116	858.901.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	110.813.773	105.950.460,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	23.641.016	23.568.778,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	23.641.016	23.568.778,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	350.406	294.349,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	301.840	257.426,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	48.566	36.923,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	1.948.084.957	1.931.901.703,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1.728.455.450	1.717.864.461,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	219.629.506	214.037.242,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	43.418.887	36.125.583,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	38.138.653	31.977.723,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	5.280.233	4.147.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	120.256.935	108.377.052,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	106.016.239	95.933.512,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	14.240.695	12.443.540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	57.478.016.212	56.815.599.392,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	25.486.159.469	25.247.161.630,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	22.591.004.772	22.382.213.438,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.895.154.697	2.864.948.192,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.161.156.445	3.055.554.842,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.891.920.076	2.797.336.421,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	269.236.368	258.218.421,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	7.550.475.794	7.427.519.029,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	6.930.780.416	6.835.323.444,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	619.695.378	592.195.585,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	21.280.224.501	21.085.363.891,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	19.329.118.867	19.145.350.817,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.951.105.633	1.940.013.074,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	924.783.210	916.030.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	924.720.000	916.030.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0002	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	924.720.000	916.030.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0002	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	924.720.000	916.030.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0002	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	894.000.000	891.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0002	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	30.720.000	24.480.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja								
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer		
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.210	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0002	5.1.02.01	Belanja Barang	63.210	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0002	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	63.210	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0002	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	63.210	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.174.206	22.174.106,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.174.206	22.174.106,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0005	5.1.02.01	Belanja Barang	8.954.100	8.954.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0005	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.954.100	8.954.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0005	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	244.100	244.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0005	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.530.000	2.530.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0005	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.080.000	5.080.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0005	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.100.000	1.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0005	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	13.220.106	13.220.106,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0005	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.220.106	13.220.106,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0005	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.170.106	12.170.106,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0005	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.050.000	1.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0006		Pengetolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.999.000	8.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.000	8.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0006	5.1.02.01	Belanja Barang	999.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0006	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	999.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0006	5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	999.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0006	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000	8.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0006	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.000.000	8.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.02.0006	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000	8.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.880.000	30.564.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.880.000	30.564.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.880.000	30.564.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.05.0009	5.1.02.01	Belanja Barang	18.880.000	18.564.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.05.0009	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.880.000	18.564.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.05.0009	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.880.000	18.564.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.05.0009	5.1.02.02	Belanja Jasa	12.000.000	12.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.05.0009	5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.000.000	12.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.05.0009	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	12.000.000	12.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	274.547.983	240.404.469,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.984.199	140.352.119,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.984.199	140.352.119,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0004	5.1.02.01	Belanja Barang	149.984.199	140.352.119,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0004	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	149.984.199	140.352.119,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0004	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	34.513.119	34.513.119,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0004	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	43.443.180	43.289.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0004	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	72.027.900	62.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.394.084	42.367.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.394.084	42.367.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0005	5.1.02.01	Belanja Barang	42.394.084	42.367.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0005	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	42.394.084	42.367.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0005	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	27.084	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0005	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	42.367.000	42.367.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.469.700	17.962.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.469.700	17.962.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0008	5.1.02.01	Belanja Barang	18.469.700	17.962.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0008	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.469.700	17.962.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0008	5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan- Natura dan Pakan Lainnya	13.705.800	13.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0008	5.1.02.01.01.0047	Belanja Persediaan Penelitian- Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	4.763.900	4.642.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.700.000	39.723.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.700.000	39.723.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0009	5.1.02.01	Belanja Barang	506.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0009	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	506.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0009	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	506.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0009	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	63.194.000	39.723.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0009	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	63.194.000	39.723.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.06.0009	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63.194.000	39.723.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	195.592.363	21.208.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	195.592.363	21.208.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	195.592.363	21.208.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0006	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0,00	22.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0006	5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0	0,00	22.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0006	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0	0,00	22.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0006	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0	0,00	173.592.363	21.208.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0006	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0	0,00	101.569.440	2.308.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0006	5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0	0,00	4.617.600	2.308.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0006	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0	0,00	96.951.840	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0006	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0	0,00	72.022.923	18.900.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.07.0006	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0	0,00	72.022.923	18.900.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.437.961.233	15.615.399.288,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.333.146	5.928.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.333.146	5.928.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0001	5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0001	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0001	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.000.000	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0001	5.1.02.02	Belanja Jasa	1.333.146	928.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0001	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.333.146	928.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0001	5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.333.146	928.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.722.790.126	6.377.509.333,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.722.790.126	6.377.509.333,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0002	5.1.02.01	Belanja Barang	100.704.600	99.372.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0002	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.704.600	99.372.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0002	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	30.000.000	28.792.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0002	5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan- Natura dan Pakan Lainnya	70.704.600	70.579.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0002	5.1.02.02	Belanja Jasa	6.622.085.526	6.278.137.033,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0002	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.622.085.526	6.278.137.033,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0002	5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	186.500.000	184.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0002	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	151.700.000	111.642.261,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0002	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	5.689.485.526	5.441.588.064,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0002	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat /Faksimili/Internet/TV Berlangganan	594.400.000	540.906.708,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor	39.136.000	38.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.136.000	38.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0003	5.1.02.01	Belanja Barang	636.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0003	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	636.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0003	5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	636.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0003	5.1.02.02	Belanja Jasa	38.500.000	38.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0003	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	38.500.000	38.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0003	5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	38.500.000	38.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.669.701.961	9.193.461.955,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.669.701.961	9.193.461.955,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0004	5.1.02.02	Belanja Jasa	9.669.701.961	9.193.461.955,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0004	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.339.834.822	8.879.637.456,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0004	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.339.834.822	7.212.971.016,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0004	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.000.000.000	1.666.666.440,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0004	5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	329.867.139	313.824.499,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0004	5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	290.389.131	276.498.156,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0004	5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	17.545.320	16.589.894,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.08.0004	5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	21.932.688	20.736.449,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.459.073.664	4.100.468.020,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.008.200	56.424.020,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.008.200	56.424.020,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0001	5.1.02.01	Belanja Barang	36.025.000	36.010.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0001	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	36.025.000	36.010.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0001	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	36.025.000	36.010.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0001	5.1.02.02	Belanja Jasa	2.737.800	1.676.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0001	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.737.800	1.676.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0001	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.737.800	1.676.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0001	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	21.245.400	18.738.020,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0001	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.245.400	18.738.020,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0001	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	21.245.400	18.738.020,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.010.520	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.010.520	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0002	5.1.02.01	Belanja Barang	150.010.520	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0002	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	150.010.520	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0002	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	150.000.000	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0002	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.520	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.249.054.944	3.894.044.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.249.054.944	3.894.044.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0009	5.1.02.01	Belanja Barang	1.054.944	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0009	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.054.944	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0009	5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1.054.944	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0009	5.1.02.02	Belanja Jasa	4.248.000.000	3.894.044.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0009	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.248.000.000	3.894.044.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.09.0009	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.248.000.000	3.894.044.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	123.445.078.069	124.469.586.563,00	8.297.000.000	8.118.683.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	123.445.078.069	124.469.586.563,00	8.297.000.000	8.118.683.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	16.808.311.964	16.354.397.081,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	16.808.311.964	16.354.397.081,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	16.808.311.964	16.354.397.081,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	16.808.311.964	16.354.397.081,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.636.766.105	108.115.189.482,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	106.636.766.105	108.115.189.482,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	106.636.766.105	108.115.189.482,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	106.636.766.105	108.115.189.482,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	4.176.107.000	3.999.183.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0	0,00	4.176.107.000	3.999.183.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0	0,00	4.176.107.000	3.999.183.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0	0,00	4.176.107.000	3.999.183.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0,00	4.120.893.000	4.119.500.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0	0,00	4.120.893.000	4.119.500.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0	0,00	4.120.893.000	4.119.500.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.1.10.0001	5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0	0,00	4.120.893.000	4.119.500.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode		Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Kelompok Belanja								
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer		
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	595.170.094	325.830.774,00	10.974.395.109	10.466.470.712,32	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	520.310.278	257.500.206,00	10.974.395.109	10.466.470.712,32	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0009		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	64.380.000	58.213.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.380.000	58.213.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0009	5.1.02.01	Belanja Barang	277.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0009	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	277.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0009	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	277.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0009	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	64.102.500	58.213.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0009	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	64.102.500	58.213.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0009	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	64.102.500	58.213.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0010		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	0	0,00	2.914.429.913	2.667.037.329,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	2.914.429.913	2.667.037.329,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0010	5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0	0,00	2.914.429.913	2.667.037.329,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0010	5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	0	0,00	1.778.980.461	1.618.838.082,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0010	5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0	0,00	1.749.682.919	1.589.544.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0010	5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	0	0,00	3.203.460	3.200.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0010	5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0	0,00	26.094.082	26.094.082,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0010	5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0	0,00	1.135.449.452	1.048.199.247,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0010	5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0	0,00	1.135.449.452	1.048.199.247,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0017		Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	312.946.072	56.303.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.946.072	56.303.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0017	5.1.02.01	Belanja Barang	3.000.000	2.925.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0017	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000	2.925.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0017	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.000.000	2.925.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0017	5.1.02.02	Belanja Jasa	309.946.072	53.378.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0017	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	309.946.072	53.378.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0017	5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	309.946.072	53.378.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0026		Pengembangan Rumah Sakit	142.984.206	142.984.206,00	8.059.965.196	7.799.433.383,32	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.984.206	142.984.206,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0026	5.1.02.02	Belanja Jasa	142.984.206	142.984.206,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0026	5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	142.984.206	142.984.206,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0026	5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- Jasa Desain Arsitektural	142.984.206	142.984.206,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0026	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0,00	8.059.965.196	7.799.433.383,32	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0026	5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0	0,00	8.059.965.196	7.799.433.383,32	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0026	5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	0,00	8.059.965.196	7.799.433.383,32	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.01.0026	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	8.059.965.196	7.799.433.383,32	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	74.859.816	68.330.568,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0008		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	49.873.548	45.704.768,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.873.548	45.704.768,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0008	5.1.02.01	Belanja Barang	49.873.548	45.704.768,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0008	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	49.873.548	45.704.768,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0008	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.635.360	4.635.360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0008	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	9.084.240	9.084.240,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0008	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.081.797	10.081.797,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0008	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17.127.660	17.121.380,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0008	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.665.000	1.665.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0008	5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan- Natura dan Pakan Lainnya	3.116.991	3.116.991,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0008	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.162.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja								
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer		
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	24.986.268	22.625.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.986.268	22.625.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0009	5.1.02.01	Belanja Barang	24.986.268	22.625.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0009	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.986.268	22.625.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0009	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	68.598	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.1.02.0009	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.917.670	22.625.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.571.806.779	6.164.108.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	6.471.962.679	6.071.988.049,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.01.0001		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.471.962.679	6.071.988.049,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.471.962.679	6.071.988.049,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.01.0001	5.1.02.02	Belanja Jasa	6.471.962.679	6.071.988.049,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.01.0001	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.121.131.980	5.733.074.287,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.01.0001	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.121.131.980	5.733.074.287,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.01.0001	5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/ Asuransi	350.830.699	338.913.762,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.01.0001	5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	307.615.051	298.603.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.01.0001	5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	19.206.432	17.916.204,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.01.0001	5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	24.009.216	22.394.158,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	99.844.100	92.119.951,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.02.0001		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	99.844.100	92.119.951,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.844.100	92.119.951,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.02.0001	5.1.02.01	Belanja Barang	51.076.100	49.841.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.02.0001	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.076.100	49.841.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.02.0001	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.339.200	1.226.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.02.0001	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.672.500	3.636.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.02.0001	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	714.400	519.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.02.0001	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.100.000	2.080.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.02.0001	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	43.250.000	42.379.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.02.0001	5.1.02.02	Belanja Jasa	48.768.000	42.278.751,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.02.0001	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.600.000	3.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.02.0001	5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	3.600.000	3.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.02.0001	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.168.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.02.0001	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	3.168.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.02.0001	5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	42.000.000	38.678.751,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.1.02.0001	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	42.000.000	38.678.751,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
				Jumlah	235.045.373.010	233.230.226.401,00	19.466.987.472	18.606.362.212,32	0	0,00	0	0,00

Tanjungpinang, 31 Desember 2024



KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dr. MOH. BISRI, SKM, M.Kes
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710109 199501 1 001



LAPORAN REALISASI APBD RSJKO ENSKU HAJI DAUD
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2024



Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	89.108.533.028	86.934.850.213	5.651.589.100	4.747.999.394	0	0	0	0
1.02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	89.108.533.028	86.934.850.213	5.651.589.100	4.747.999.394	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002			Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	89.108.533.028	86.934.850.213	5.651.589.100	4.747.999.394	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	79.348.563.898	77.715.591.929,00	1.905.565.300	1.658.877.894,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	246.559.948	232.210.686,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	216.822.448	205.133.186,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.822.448	205.133.186,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0001	5.1.02.01	Belanja Barang	126.213.448	123.581.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0001	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	126.213.448	123.581.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0001	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	126.213.448	123.581.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0001	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	90.609.000	81.551.636,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0001	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	90.609.000	81.551.636,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0001	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	90.609.000	81.551.636,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.737.500	27.077.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.737.500	27.077.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0006	5.1.02.01	Belanja Barang	6.406.000	3.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0006	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.406.000	3.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0006	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.056.000	3.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0006	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	350.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0006	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	23.331.500	23.177.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0006	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.331.500	23.177.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.01.0006	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.331.500	23.177.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.357.032.381	48.075.850.981,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja								
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer		
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47.585.005.081	47.322.346.981,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	47.585.005.081	47.322.346.981,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	16.031.053.200	15.917.761.657,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	11.434.548.200	11.408.457.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	10.380.430.400	10.355.339.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.054.117.800	1.053.117.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.067.532.592	1.056.874.460,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.008.915.682	998.700.374,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	58.616.910	58.174.086,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	252.330.000	247.330.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	252.330.000	247.330.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.146.575.000	1.114.690.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.049.190.000	1.018.305.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	97.385.000	96.385.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	73.475.000	73.345.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	73.475.000	73.345.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	660.538.900	655.690.680,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	610.286.360	605.865.720,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	50.252.540	49.824.960,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.050.362	12.327.253,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13.550.362	12.327.253,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.184.059	183.920,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.660.913	164.886,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	523.146	19.034,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.279.078.622	1.255.171.351,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.152.976.637	1.130.224.543,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	126.101.985	124.946.808,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	26.435.048	23.422.841,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	23.245.704	21.233.497,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	3.189.344	2.189.344,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	74.305.417	70.268.752,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	66.737.421	63.700.756,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	7.567.996	6.567.996,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	31.553.951.881	31.404.585.324,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	14.521.634.992	14.453.783.551,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13.154.540.650	13.089.659.859,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.367.094.342	1.364.123.692,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.074.213.367	2.062.759.158,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.947.746.996	1.938.386.876,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	126.466.371	124.372.282,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.932.523.464	1.912.022.669,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.932.523.464	1.912.022.669,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	13.025.580.058	12.976.019.946,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12.075.507.843	12.028.693.009,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0001	5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	950.072.215	947.326.937,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	703.704.000	685.388.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	703.704.000	685.388.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0002	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	703.704.000	685.388.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0002	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	703.704.000	685.388.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0002	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	695.544.000	677.228.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0002	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000	8.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	68.323.300	68.116.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.323.300	68.116.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0005	5.1.02.01	Belanja Barang	17.821.300	17.614.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0005	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.821.300	17.614.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0005	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.787.400	1.786.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0005	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.559.500	1.548.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0005	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.985.400	7.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0005	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.489.000	6.480.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0005	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	50.502.000	50.502.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0005	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.502.000	50.502.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.02.0005	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.502.000	50.502.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	24.306.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.05.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	25.000.000	24.306.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	24.306.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.05.0004	5.1.02.01	Belanja Barang	2.698.000	2.278.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.05.0004	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.698.000	2.278.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.05.0004	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.469.600	2.278.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.05.0004	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	228.400	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.05.0004	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	22.302.000	22.028.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.05.0004	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.302.000	22.028.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.05.0004	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.302.000	22.028.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	646.229.700	567.473.632,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	98.269.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	98.269.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0001	5.1.02.01	Belanja Barang	100.000.000	98.269.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0001	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000.000	98.269.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0001	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	100.000.000	98.269.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	70.022.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	70.022.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0004	5.1.02.01	Belanja Barang	75.000.000	70.022.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0004	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	75.000.000	70.022.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0004	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	27.000.000	26.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0004	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	48.000.000	43.772.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	261.282.300	192.223.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.282.300	192.223.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0005	5.1.02.01	Belanja Barang	261.282.300	192.223.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0005	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	261.282.300	192.223.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0005	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	261.282.300	192.223.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0008		Fasilitas Kunjungan Tamu	60.000.000	58.359.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	58.359.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0008	5.1.02.01	Belanja Barang	60.000.000	58.359.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0008	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	60.000.000	58.359.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0008	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.300.000	30.099.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0008	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	29.700.000	28.260.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.947.400	148.600.632,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.947.400	148.600.632,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0009	5.1.02.01	Belanja Barang	2.505.400	1.780.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0009	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.505.400	1.780.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0009	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.932.000	1.780.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0009	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	573.400	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0009	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	147.442.000	146.820.632,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0009	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	147.442.000	146.820.632,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.06.0009	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	147.442.000	146.820.632,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja								
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer		
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.303.833.494	1.271.743.614,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.303.833.494	1.271.743.614,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.303.833.494	1.271.743.614,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.08.0002	5.1.02.01	Belanja Barang	60.000.000	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.08.0002	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	60.000.000	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.08.0002	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	60.000.000	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.08.0002	5.1.02.02	Belanja Jasa	1.243.833.494	1.211.743.614,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.08.0002	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.243.833.494	1.211.743.614,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.08.0002	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	47.000.000	46.924.290,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.08.0002	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	29.122.200	29.122.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.08.0002	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.069.931.785	1.037.999.669,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.08.0002	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	97.779.509	97.697.455,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.411.014.876	4.148.200.659,00	449.865.300	388.702.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.731.200	9.609.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.731.200	9.609.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0001	5.1.02.02	Belanja Jasa	12.731.200	9.609.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0001	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.731.200	9.609.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0001	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.731.200	9.609.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177.941.000	176.938.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.941.000	176.938.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0002	5.1.02.01	Belanja Barang	104.366.500	104.353.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0002	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	104.366.500	104.353.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0002	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	104.366.500	104.353.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0002	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	73.574.500	72.585.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0002	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	73.574.500	72.585.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0002	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	73.574.500	72.585.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	64.432.300	45.106.759,00	53.115.300	53.075.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.432.300	45.106.759,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003	5.1.02.01	Belanja Barang	170.380	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	170.380	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	170.380	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003	5.1.02.02	Belanja Jasa	4.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	60.261.920	45.106.759,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.261.920	45.106.759,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.261.920	45.106.759,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	53.115.300	53.075.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0	0,00	53.115.300	53.075.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0	0,00	35.834.000	35.800.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0	0,00	35.834.000	35.800.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0	0,00	17.281.300	17.275.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0	0,00	4.027.300	4.025.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0003	5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0	0,00	13.254.000	13.250.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0005		Pemeliharaan Mebel	50.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0005	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	50.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0005	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0005	5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	50.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	580.798.500	511.815.000,00	88.750.000	88.750.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.798.500	511.815.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006	5.1.02.01	Belanja Barang	305.918.000	304.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	305.918.000	304.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	305.000.000	304.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	46.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	872.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	274.880.500	206.865.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	274.880.500	206.865.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006	5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	274.880.500	206.865.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	88.750.000	88.750.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0,00	88.750.000	88.750.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0,00	88.750.000	88.750.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0006	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0	0,00	88.750.000	88.750.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0007		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.245.907.300	1.140.220.300,00	308.000.000	246.877.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.245.907.300	1.140.220.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0007	5.1.02.01	Belanja Barang	173.405.000	173.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0007	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	173.405.000	173.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0007	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	173.405.000	173.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0007	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.072.502.300	966.920.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0007	5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.072.502.300	966.920.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0007	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.072.502.300	966.920.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	308.000.000	246.877.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0007	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0,00	308.000.000	246.877.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0007	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0,00	308.000.000	246.877.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0007	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0,00	308.000.000	246.877.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.979.204.576	1.964.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.979.204.576	1.964.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0009	5.1.02.02	Belanja Jasa	1.979.204.576	1.964.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0009	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.979.204.576	1.964.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0009	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.979.204.576	1.964.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000	299.790.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	299.790.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0010	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	300.000.000	299.790.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0010	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	300.000.000	299.790.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0010	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	200.400.000	200.190.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.09.0010	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	99.600.000	99.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	24.358.893.499	23.395.806.357,00	1.455.700.000	1.270.175.894,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	24.358.893.499	23.395.806.357,00	1.455.700.000	1.270.175.894,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.000.000.000	4.874.424.726,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	5.000.000.000	4.874.424.726,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	5.000.000.000	4.874.424.726,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	5.000.000.000	4.874.424.726,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.358.893.499	18.521.381.631,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.358.893.499	18.521.381.631,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.358.893.499	18.521.381.631,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.358.893.499	18.521.381.631,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0,00	1.455.700.000	1.270.175.894,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0	0,00	1.455.700.000	1.270.175.894,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0	0,00	1.455.700.000	1.270.175.894,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.01.1.10.0001	5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0	0,00	1.455.700.000	1.270.175.894,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.410.884.834	3.974.505.235,00	3.746.023.800	3.089.121.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.636.527.364	2.219.265.032,00	3.673.795.300	3.019.611.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	26.351.000	26.351.000,00	253.932.000	253.905.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.351.000	26.351.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.1.02.02	Belanja Jasa	26.351.000	26.351.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	26.351.000	26.351.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	26.351.000	26.351.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	80.632.000	80.605.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0	0,00	54.367.000	54.350.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0	0,00	54.367.000	54.350.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0	0,00	54.367.000	54.350.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0,00	26.265.000	26.255.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0,00	26.265.000	26.255.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0	0,00	26.265.000	26.255.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0,00	173.300.000	173.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0	0,00	173.300.000	173.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	0,00	173.300.000	173.300.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0004	5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	0	0,00	173.300.000	173.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	25.800.700	24.420.000,00	2.078.999.300	1.617.066.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.800.700	24.420.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010	5.1.02.01	Belanja Barang	270.700	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	270.700	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	270.700	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	25.530.000	24.420.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.530.000	24.420.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.530.000	24.420.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	2.078.999.300	1.617.066.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010	5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0	0,00	2.078.999.300	1.617.066.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010	5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	0	0,00	2.078.999.300	1.617.066.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010	5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0	0,00	450.353.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010	5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	0	0,00	128.646.300	126.816.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0010	5.2.02.07.01.0022	Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa	0	0,00	1.500.000.000	1.490.250.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0016		Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	0	0,00	1.159.864.000	1.016.540.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	1.159.864.000	1.016.540.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0016	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0,00	384.750.000	289.190.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0016	5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0	0,00	295.500.000	289.190.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0016	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0	0,00	295.500.000	289.190.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0016	5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	0,00	89.250.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0016	5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0	0,00	14.250.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0016	5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0	0,00	75.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0016	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0	0,00	775.114.000	727.350.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0016	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0	0,00	279.000.000	277.350.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0016	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0	0,00	279.000.000	277.350.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0016	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0	0,00	496.114.000	450.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0016	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0	0,00	46.114.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0016	5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0	0,00	450.000.000	450.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.584.375.664	2.168.494.032,00	181.000.000	132.100.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.584.375.664	2.168.494.032,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027	5.1.02.01	Belanja Barang	2.584.375.664	2.168.494.032,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.584.375.664	2.168.494.032,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	49.240.000	2.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027	5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat- Obat-Obatan Lainnya	1.855.575.664	1.700.444.764,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan- Natura	499.364.500	330.820.773,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027	5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan- Natura dan Pakan Lainnya	180.195.500	134.828.495,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	181.000.000	132.100.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0,00	181.000.000	132.100.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027	5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0	0,00	181.000.000	132.100.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.01.0027	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0	0,00	181.000.000	132.100.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.735.169.470	1.720.861.598,00	57.228.500	54.560.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	828.471.500	822.747.548,00	57.228.500	54.560.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	828.471.500	822.747.548,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.1.02.01	Belanja Barang	250.268.500	245.514.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	250.268.500	245.514.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.366.800	930.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.285.000	4.879.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	89.131.700	87.305.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	25.525.000	25.485.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.300.000	20.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.500.000	19.095.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	87.160.000	87.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.1.02.02	Belanja Jasa	456.850.000	456.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	391.850.000	391.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.000.000	8.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	383.850.000	383.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.000.000	14.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	15.000.000	14.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	50.000.000	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	121.353.000	120.983.548,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	121.353.000	120.983.548,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	111.853.000	111.483.548,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.500.000	9.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	57.228.500	54.560.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	0,00	12.360.000	12.360.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0	0,00	12.360.000	12.360.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0	0,00	12.360.000	12.360.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0	0,00	44.868.500	42.200.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0	0,00	28.100.000	26.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0	0,00	28.100.000	26.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0	0,00	16.768.500	16.200.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0009	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0	0,00	16.768.500	16.200.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0022		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	906.697.970	898.114.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	906.697.970	898.114.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0022	5.1.02.01	Belanja Barang	906.697.970	898.114.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0022	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	906.697.970	898.114.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0022	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	30.900.000	30.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0022	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	359.880.470	357.854.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0022	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	34.300.000	34.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.02.0022	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	481.617.500	475.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0	0,00	15.000.000	14.950.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0	0,00	15.000.000	14.950.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	15.000.000	14.950.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.03.0002	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0	0,00	15.000.000	14.950.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.03.0002	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0	0,00	15.000.000	14.950.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.03.0002	5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0	0,00	15.000.000	14.950.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	39.188.000	34.378.605,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.04.0002		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	39.188.000	34.378.605,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.188.000	34.378.605,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.04.0002	5.1.02.01	Belanja Barang	9.900.000	9.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.04.0002	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.900.000	9.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.04.0002	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.900.000	9.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.04.0002	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	29.288.000	24.928.605,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.04.0002	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.288.000	24.928.605,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.02.1.04.0002	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.288.000	24.928.605,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.349.084.296	5.244.753.049,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	5.175.135.154	5.075.006.807,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.01.0001		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.175.135.154	5.075.006.807,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.175.135.154	5.075.006.807,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.01.0001	5.1.02.02	Belanja Jasa	5.175.135.154	5.075.006.807,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.01.0001	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.856.097.717	4.802.282.999,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.01.0001	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.648.800.000	1.608.929.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.01.0001	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.207.297.717	3.193.353.499,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.01.0001	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	319.037.437	272.723.808,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.01.0001	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	281.301.170	240.059.722,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.01.0001	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	16.557.467	14.517.366,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.01.0001	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	21.178.800	18.146.720,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	173.949.142	169.746.242,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02.0001		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	173.949.142	169.746.242,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.949.142	169.746.242,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02.0001	5.1.02.01	Belanja Barang	51.775.400	48.772.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02.0001	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.775.400	48.772.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02.0001	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.600.000	20.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02.0001	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.639.800	850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02.0001	5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen / Administrasi Tender	1.085.600	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02.0001	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	28.450.000	27.422.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02.0001	5.1.02.02	Belanja Jasa	71.750.000	70.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02.0001	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	22.200.000	21.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02.0001	5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	22.200.000	21.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02.0001	5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	49.550.000	49.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02.0001	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	49.550.000	49.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02.0001	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	50.423.742	50.423.742,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02.0001	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.423.742	50.423.742,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	1.02.03.1.02.0001	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.423.742	50.423.742,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah					89.108.533.028	86.934.850.213,00	5.651.589.100	4.747.999.394,00	0	0,00	0	0,00

Tanjungpinang, 31 Desember 2024



KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dr. MOH. BISRI, SKM, M.Kes
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710109 199501 1 001

20
24

DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
"Bandar Seri Kota Piring" Kawasan Perkantoran
Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar
Lantai 2 dan 3 Pulau Dompak Seri Darul Makmur -
Tanjungpinang



dinkes.kepriprov.go.id



@dinkesprovkepri



Dinkes Prov Kepri